

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

A. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang udara Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan.

1. Kondisi Umum Wilayah

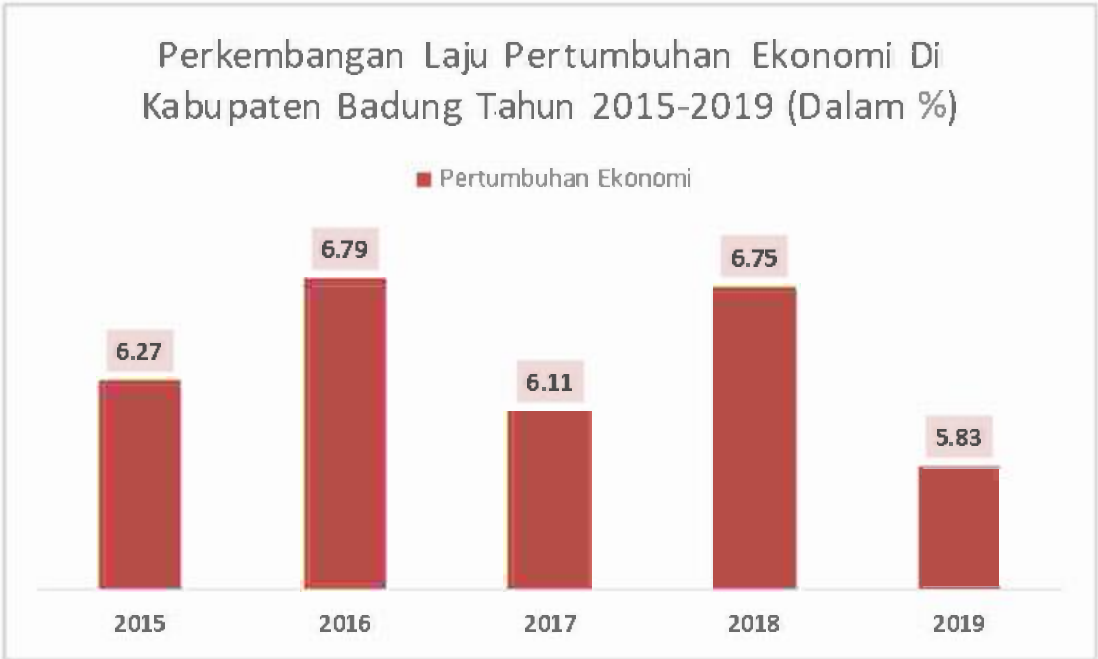
Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan,

(3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,79% dan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,83%. Penurunan pertumbuhan ekonomi paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu menurun 0,92 poin dari tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 6,75%.

Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan yang signifikan, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2019 lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Artinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung lebih baik secara rata-rata dari kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2019 merupakan ketiga tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Gambar 5.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun angka kemiskinan Kabupaten Badung memiliki trend positif selama periode 2015-2019. Angka kemiskinan di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 2,33% penduduk miskin di Kabupaten Badung. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin ini berkurang menjadi hanya 1,78%.

Angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2019 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61% dan Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%. Kabupaten Badung, pada tahun 2019, tercatat memiliki angka kemiskinan paling rendah di Provinsi Bali bahkan jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung juga tercatat menjadi satu-satunya wilayah dengan angka kemiskinan di bawah 2% pada tahun 2019.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

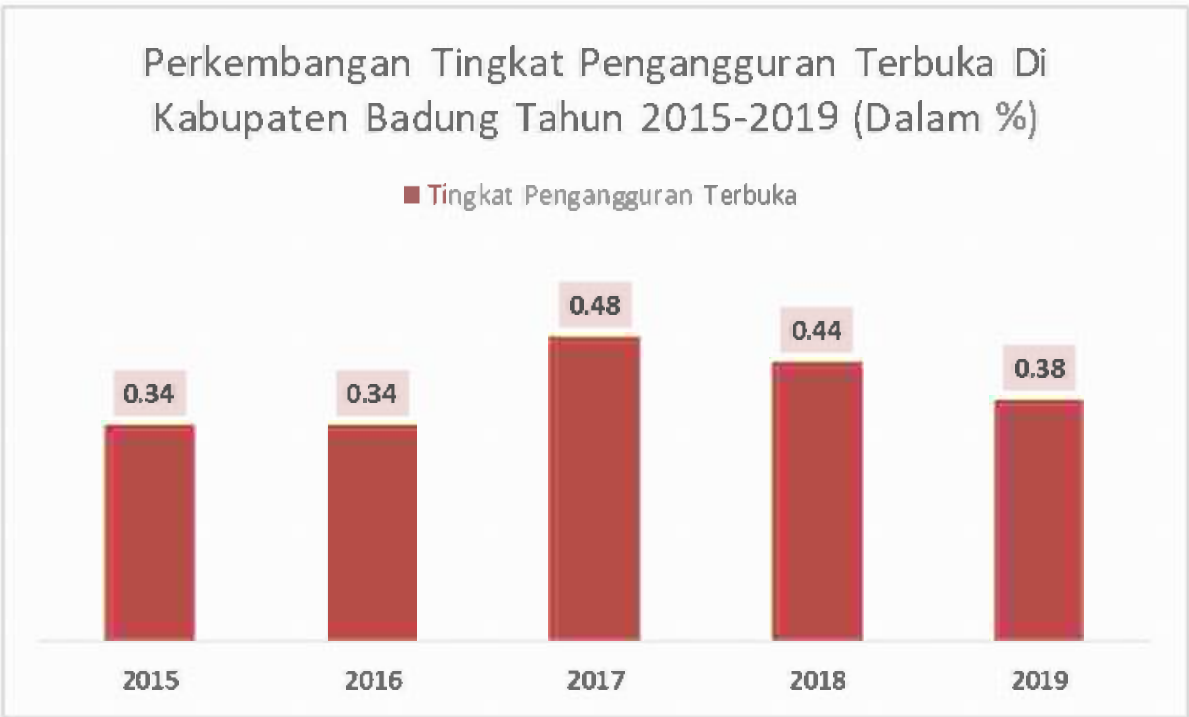
Gambar 5.2.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun pada track yang positif di periode 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat angka pengangguran sebesar 0,34% dan tidak mengalami perubahan di tahun berikutnya. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu 0,48% atau meningkat 0,14 poin. Namun, trend positif terjadi yaitu angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,44% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,38%.

Angka pengangguran di Kabupaten Badung pada tahun 2019 ini berada jauh di bawah Provinsi Bali yaitu 1,52%. Kabupaten Badung juga tercatat menjadi wilayah dengan angka pengangguran terendah di Provinsi Bali pada tahun 2019. Bersama dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem menjadi wilayah dengan angka pengangguran di bawah 1% di Provinsi Bali.



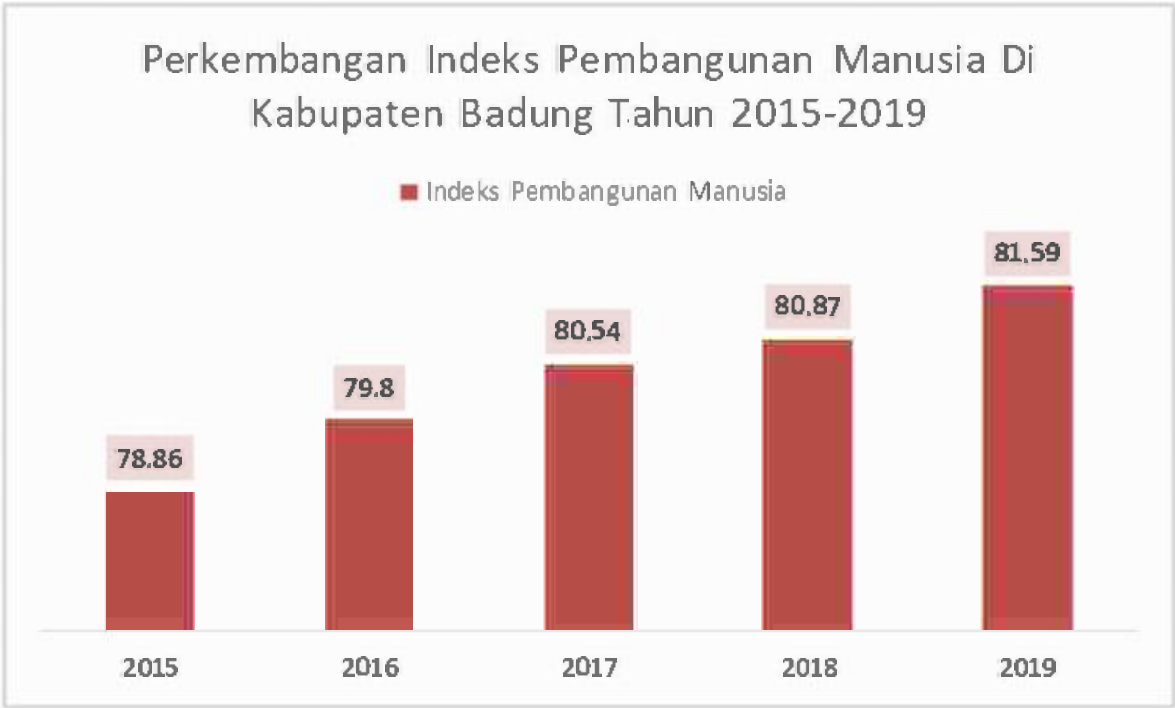
Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Gambar 5.3.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2015-2019 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 78,86 dan pada tahun 2019 meningkat 2,73 poin menjadi 81,59.

IPM Kabupaten Badung pada tahun 2019 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yang hanya 71,92. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2019, IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.



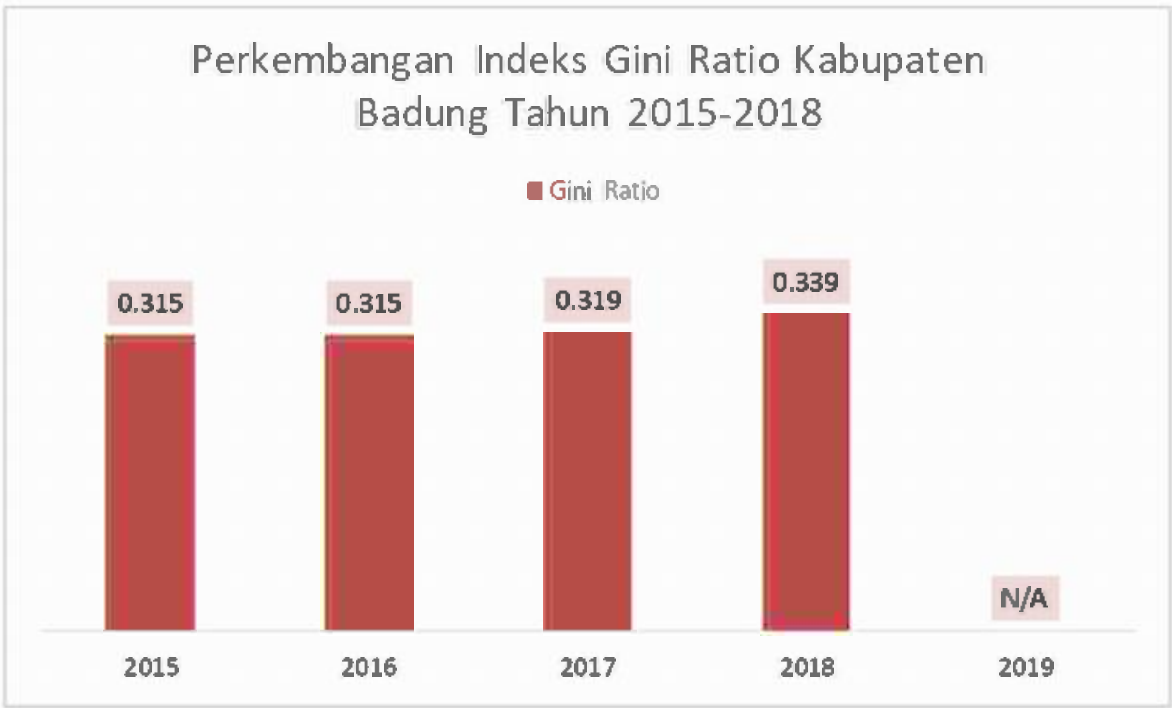
Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Gambar 5.4.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami stagnansi pada angka 0,32-0,34 selama periode 2015-2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Badung tidak semakin lebar ataupun sempit jaraknya. Ketimpangan tetap ada mengingat terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Badung Utara maupun Badung Selatan namun lebar ketimpangan ini tidak secara signifikan mengalami perubahan. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan.

Pada tahun 2015, Gini Ratio Kabupaten Badung adalah 0,315 atau 0,32 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,339 atau 0,34 atau naik sekitar 0,02 poin. Pada tahun 2018, Gini Ratio Kabupaten Badung lebih rendah dari Provinsi Bali (0,38).



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Gambar 5.5.
Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung
Tahun 2015-2018

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Keselaran Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN”	“AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP”

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung tahun 2021 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	- Pembangunan Ekonomi - Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
2	Kesehatan dan Pendidikan	- Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi - Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	- Perlindungan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	- Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
5	Pariwisata	- Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
6	Penguatan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman - Penataan ruang dan lingkungan hidup.
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2021 adalah sebagai berikut.

1. Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.
2. Merevitalisasi adat dan budaya
3. Memberdayakan subak dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
4. Meningkatnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan aman partisipatif
5. Meningkatnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan aman
6. Interpretasi hasil rata-rata nilai skm perangkat daerah
7. Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi
8. Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
9. Menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan
10. Mengembangkan sistem informasi manajemen (sim) perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi komunikasi
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi

12. Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi
13. Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa
14. Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan
15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi
16. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan
17. Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
18. Melaksanakan diklat/*bimtek/workshop* teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah
19. Melaksanakan penilaian Potensi dan kompetensi ASN
20. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah
21. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
22. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
23. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
24. Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan
25. Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun
26. Memantapkan tata kelola pendidikan
27. Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik
28. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (*continuum of care*) dengan melibatkan peran serta masyarakat
29. Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.

30. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
31. Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
32. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
33. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (*evidence based*).
34. Meningkatkan sinergi dengan berbagai *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
35. Alokasi anggaran bedah rumah dan peningkatan kualitas menjadi rumah sehat
36. Pengendalian titik- titik permukiman kumuh
37. Peningkatan kualitas umkm yang kreatif dan berdaya saing
38. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing
39. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan tentang perda dan perkara
40. Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran perda dan perkara
41. Peningkatan kualitas hidup perempuan
42. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan Indeks Tutupan hutan/Lahan
43. Memantapkan program intensifikasi
44. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
45. Pelaksanaan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung
46. Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor
47. Optimalisasi pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Tripartit
48. Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja
49. Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri

50. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
51. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
52. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
53. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
54. Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung
55. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
56. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung
57. Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah
58. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
59. Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian
60. Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri
61. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
62. Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah
63. Meningkatkan produksi perikanan
64. Penyusunan *database* DTW
65. Pembangunan daya tarik wisata baru
66. Peningkatan SDM pengelola DTW
67. Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata

- 68. Kajian dan penyusunan *database* industri pariwisata berbasis IT
- 69. Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan
- 70. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,15-7,20%
2	Angka Kemiskinan	0,60-0,40%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,310%
4	Indeks Pembangunan Manusia	81.57
5	Gini Ratio	0,33-0,37

Sumber: *Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020*

B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali, terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2015-2019 tidak tergolong baik. Hal ini terlihat pada trend pertumbuhan yang cenderung menurun.

Artinya, meskipun setiap tahun ekonomi Kabupaten Karangasem terus tumbuh namun pertumbuhannya cenderung melambat.

Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2015 yaitu berada pada angka 6,00%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi 5,92% di tahun 2016 dan kembali menurun di tahun 2016 dengan signifikan ke angka 5,06%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Karangasem mulai membaik dengan meningkat ke angka 5,48% yang setahun setelahnya yaitu 2019 kembali meningkat, meskipun tipis, ke angka 5,50%. Meskipun meningkat, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 masih berada di bawah Provinsi Bali yaitu 5,63%. Artinya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem tergolong rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem merupakan ketiga terendah setelah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Gambar 5.6.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin di Kabupaten Karangasem adalah 6,25% yang merupakan terendah selama 5 tahun terakhir. Angka penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,44%. Pada tahun berikutnya yaitu 2016, menurun secara drastis menjadi 6,61%. Penurunan ini terus berlanjut hingga ke tahun 2019.

Meskipun memiliki trend yang sangat positif, namun angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 masih jauh berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61% dan di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%. Artinya, angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem tergolong tinggi di Provinsi Bali bahkan tercatat tertinggi di Provinsi Bali dan menjadi satu-satunya wilayah dengan angka kemiskinan di atas 6%.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Gambar 5.7.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan pada periode tahun 2015-2019. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 2,5%. Artinya terdapat 2,5% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran ini kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya secara signifikan. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem menurun secara signifikan ke angka 0,72%, meskipun kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 0,99%. Pada tahun 2019, mengalami penurunan ke angka 0,60%.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2019 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 1,52%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Bahkan, bersama dengan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli menjadi wilayah dengan angka pengangguran terbuka di bawah 1%.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Gambar 5.8.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2019.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Karangasem adalah 64,68 dan pada tahun 2019 adalah 67,34.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yaitu 71,92. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

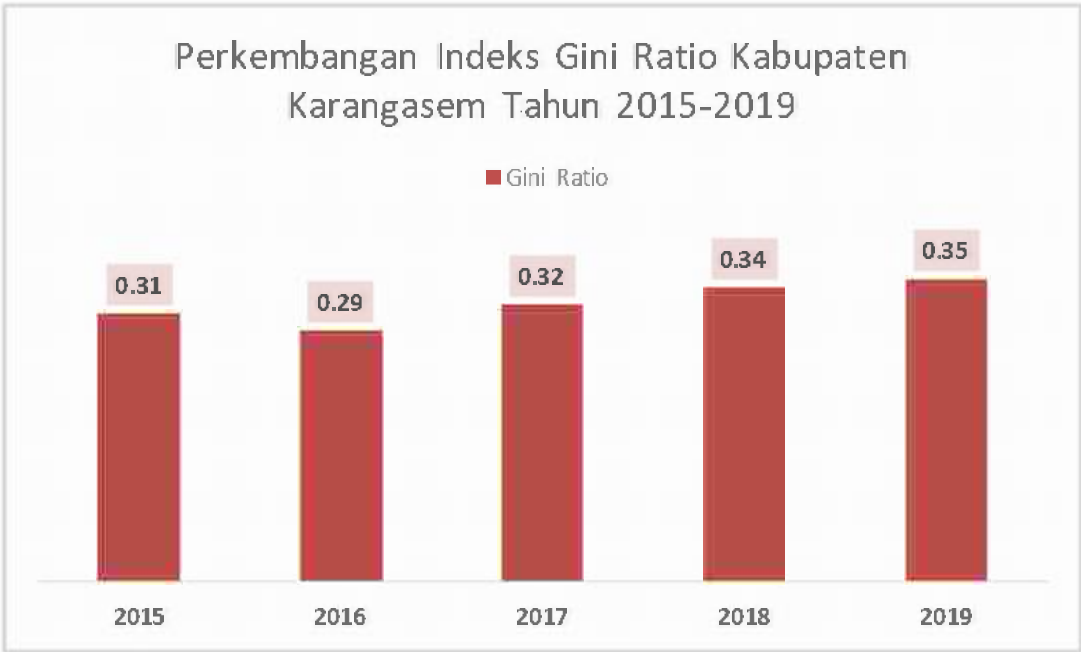
Gambar 5.9.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2019.

e. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2015-2019. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,35 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,29. Selama periode 2016-2019, Gini Ratio Kabupaten Karangasem terus mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan gap pertumbuhan antar wilayah di Kabupaten Karangasem semakin melebar.

Angka Gini Ratio di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 berada di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,37.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Gambar 5.10.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem
Tahun 2015-2019.

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN”	“PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA, INVESTASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
1	Pangan, Sandang, Papan	4	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Pertanian, dan Investasi
2	Kesehatan dan Pendidikan	2	Pembangunan Sumber Daya Manusia
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	2	Pembangunan Sumber Daya Manusia
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	3	Pariwisata, Adat, Seni, dan Budaya
5	Pariwisata	3	Pariwisata, Adat, Seni, dan Budaya
		4	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Pertanian, dan Investasi
6	Penguatan Infrastruktur	1	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
		5	Kebencanaan
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan dan pemerataan insfrastruktur wilayah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan terutama penanganan sampah plastik, serta ketaatan terhadap regulasi terutama tata ruang wilayah
- c. Pembangunan SOM dengan menjamin kesehatan ibu, bayi, balita, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal serta peningkatan keterampilan masyarakat melalui kursus-kursus dan pelatihan.
- d. Pengembangan Pariwisata berbasis desa adat (Desa Wisata)
- e. Pelestarian dan pemajuan adat, seni dan budaya daerah
- f. Lnvestasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan perijinan, penyederhanaan regulasi, pengembangan industry kecil menengah, pengembangan pertanian dalam arti luas
- g. Mitigasi dan penanggulangan bencana
- h. Mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5%-6,4%
2	Angka Kemiskinan	5,75%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1% (maksimal)
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,87
5	Gini Ratio	0,3393

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2020

C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan.

1. Kondisi Umum Wilayah

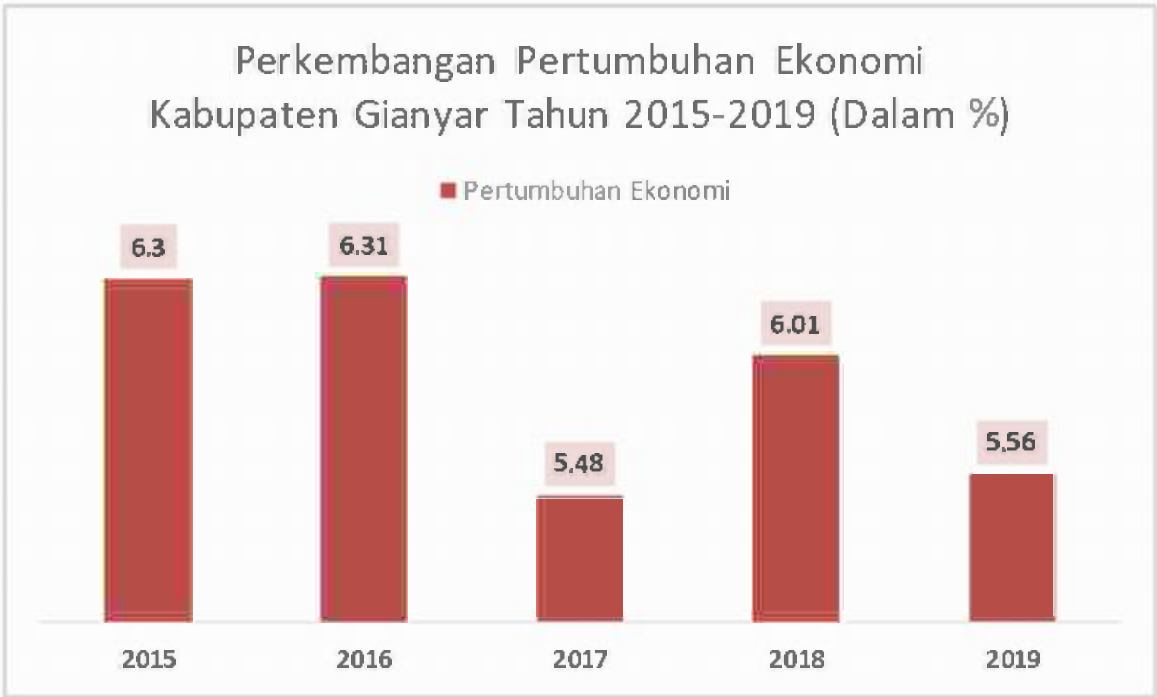
Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6.31%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 menurun menjadi 5,48% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Indikasinya adalah meskipun tumbuh, laju ekonomi Kabupaten Gianyar semakin melambat kian tahun.

Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 5,56%. Angka ini sedikit berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

yaitu 5,63% dan sama dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

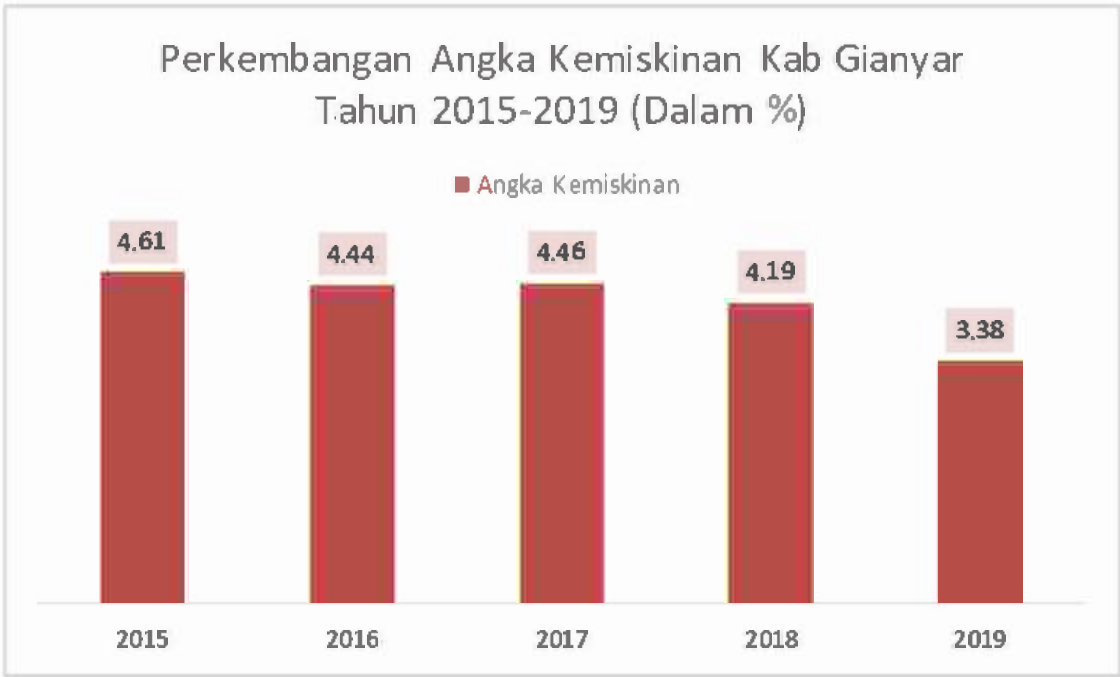
Gambar 5.11.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Meskipun laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gianyar mengalami trend penurunan, perkembangan angka kemiskinannya justru mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengakami penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,61% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 3,38%.

Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 berada di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61% dan Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan

Kabupaten Gianyar saja yang memiliki angka kemiskinan di bawah Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Gambar 5.12.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,93% dan terus mengalami penurunan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka turun drastis menjadi 0,44%. Angka ini berada jauh di bawah Provinsi Bali yaitu 1,52%. Bahkan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran terendah kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung.

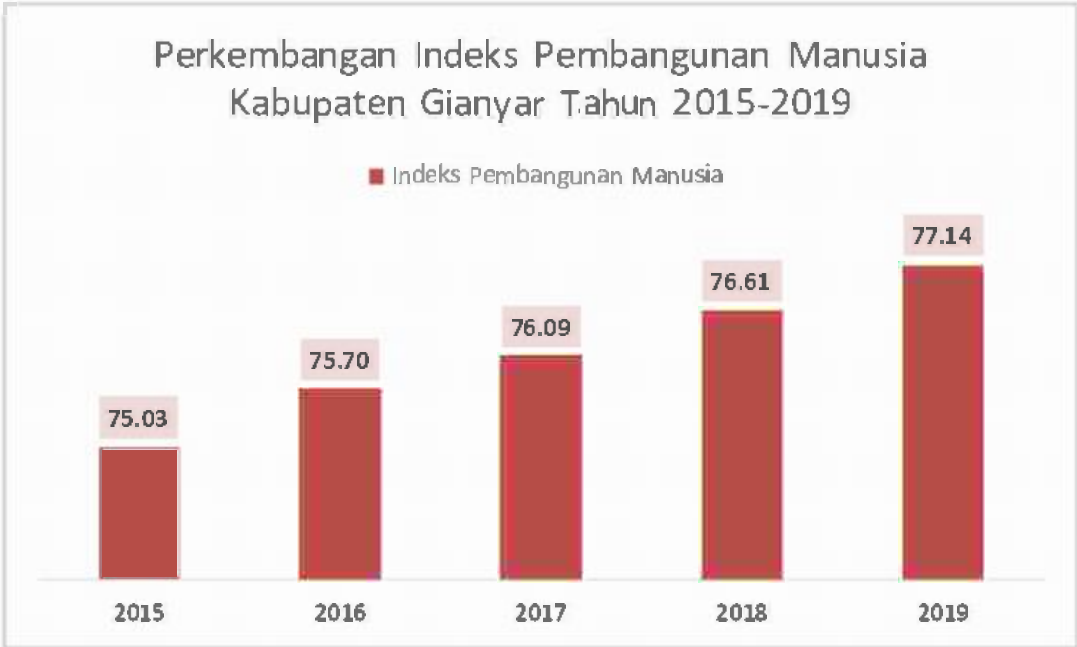


Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Gambar 5.13.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 75,03 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 77,14 di tahun 2019. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yaitu 71,92.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Gambar 5.14.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 adalah sebesar 0,268 atau turun dari tahun 2018 sebesar 0,305. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin kecil jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung lebih merata. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Gianyar cenderung merata, tidak terdapat kecamatan atau kawasan dengan tingkat perekonomian yang jauh diatas kecamatan/kawasan di sekitarnya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,325. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,37.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Gambar 5.15.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselaranan tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2021 dengan tema pembangunan Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Keselaranan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN”	“MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBDER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DALAM RANGKA MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN”

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Keselaranan prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
1	Pangan, Sandang, Papan	Pangan, Sandang, Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya
5	Pariwisata	Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar
pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan ekonomi

- a) Untuk itu isu strategis yang menjadi agenda utama
adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Penyelenggaraan program peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibarengi
dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi akan mendukung
peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi akan mendukung terciptanya
penyelenggaraan program pembangunan ekonomi
yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi
yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas
dan daya saing, serta makin memacu terciptanya
kreativitas dan inovasi guna mewujudkan masyarakat
Kabupaten Gianyar yang cerdas, penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat
tercapainya tataran pertumbuhan ekonomi yang
makin tinggi.

- b) Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar yang kini masih di bawah rata-rata Provinsi Bali. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Data BPS. Kab. Gianyar tahun 2019 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gianyar tahun 2018 mencapai 1,60 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,02 persen dan persentase penduduk miskin mencapai 4,19%.
- c) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi IPM Kabupaten Gianyar masih di bawah IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, walaupun sudah diatas rata-rata Provisi Bali, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposisi tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang, dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Isu strategis sebagai agenda utama dalam peningkatan IPM menuju masyarakat Gianyar yang cerdas adalah peningkatan umur harapan hidup melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat

dan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat.

- d) Pemerataan Pendapatan, tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Ketidakmerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar

2) Kesejahteraan sosial

Indikator kesejahteraan sosial yang penting diperhatikan adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial sebagian besar masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Bali, sehingga isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan sosial adalah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

b. Peningkatan Pelayanan Umum

1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik harus didukung perbaikan tata pemerintahan dan aparatur meliputi kelembagaan, manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan, administrasi keuangan dan pelaporan kinerja, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, beberapa isu strategis yang menjadi agenda prioritas antara lain: (a) penguatan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur, (b) peningkatan kesejahteraan aparatur, (c) penguatan pengetahuan dan kemampuan aparatur, (d) penguatan partisipasi masyarakat, dan (e) peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Gianyar Bersih dan Bermartabat.

2) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Isu strategis dalam upaya peningkatan pelayanan umum urusan wajib pelayanan dasar antara lain:

- a) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan;
- b) Ketersediaan infrastruktur wilayah dan prasarana daerah;
- c) Peningkatan kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
- e) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Adapun isu strategis peningkatan pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar meliputi:

- a) Penciptaan lapangan kerja;
- b) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- d) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e) Peningkatan ketersediaan pangan;
- f) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g) Pengendalian penduduk; dan
- h) Peningkatan investasi.

4) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Pilihan

Sesuai dengan amanat UU. No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah harus menjadi *goal* dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu:

institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.

d. Program Prioritas Daerah

Bersasarkan Isu strategis dan sasaran yang telah diurasikan selumnya, disusunlah program prioritas yang nantinya akan membawa kabupaten Gianyar pada sasaran yang ingin dicapai. Program Prioritas tersebut diantaranya :

- 1) Peningkatan ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan
- 2) Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- 5) Pembangunan Bidang Pariwisata;
- 6) Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian lingkungan
- 7) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

e. Program Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gianyar, teridentifikasi isu-isu strategis ketahanan pangan antara lain :

- 1) Belum mantapnya ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi) di Kabupaten Gianyar
- 2) SKOR PPH (Pola Pangan Harapan) mengalami peningkatan namun belum mencapai standar dengan komposisi komoditas pangan nabati didominasi oleh beras, belum beranekaragam
- 3) Pola pendekatan implementasi pembangunan yang digunakan selama ini, belum menunjukkan keberhasilan secara optimal. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan pembenahan/inovasi sehingga diharapkan

bisa meningkatkan kemandirian pangan dan ekonomi yang berdampak pada pengendalian tingkat inflasi akibat fluktuasi harga komoditas pangan dan stabilitas keamanan sosial dalam arti luas. Sehingga upaya meningkatkan kemandirian ketahanan pangan pada tingkat masyarakat terkecil (keluarga) berdampak lebih luas pada pengendalian inflasi. Inilah yang diharapkan akan terwujud melalui inovasi **PUSPA AMAN**.

Arti kata:

PUSPA AMAN (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri dan Nyaman)

- Pusat Pangan (PUSPA):
Sebuah wilayah/kawasan yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk menjamin keterdiaan beragam kebutuhan pangan bagi keluarga.
- Alami (A):
Produk pangan segar yang bebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya
- Mandiri (M):
Produksi dan konsumsi pangan segar yang mana peran produsen dan konsumen dilakukan oleh satu pemeran dengan ketergantungan ekonomi pada pihak lain sangat minimal.
- Asri (A):
Indah dan sedap dipandang mengusung konsep luhur lokal
- Nyaman (N):
Segar, sehat dan enak bagi indera manusia.

Cakupan Ruang Lingkup :

PUSPA AMAN mencakup usaha setiap rumah tangga untuk menyediakan pangan segar dengan memanfaatkan lahan pekarangannya, membangun konektivitas antar rumah tangga serupa, dicirikan dengan adanya rumah bibit bersama yang berfungsi optimal, hingga terwujud penyediaan pangan segar

skala kawasan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, didukung seluruh lembaga pemangku kepentingan terkait.

Mencakup:

- a) Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan
- b) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal
- c) Konservasi genetik pangan (tanaman, ternak, ikan)
- d) Menjaga kelestarian melalui kebun bibit desa
- e) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,67%
2	Angka Kemiskinan	4,10%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,05%
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,53
5	Gini Ratio	0,279

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2020

D. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai.

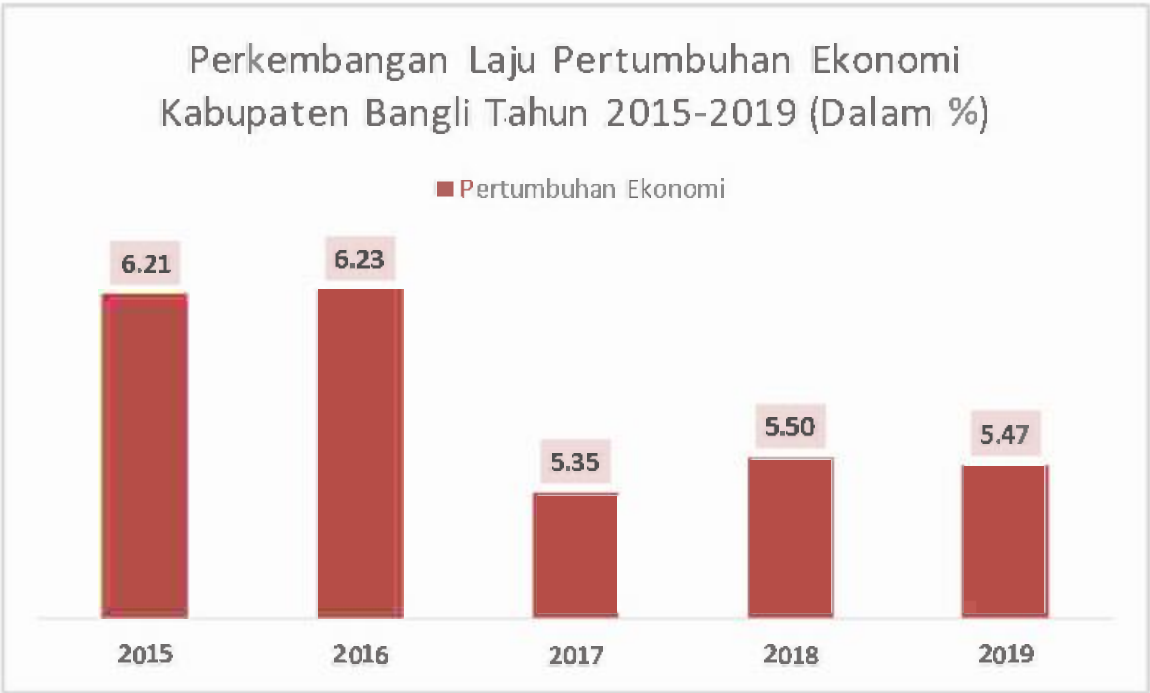
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada periode 2016-2017. Tahun 2016 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli adalah 6,23% meningkat dari tahun 2015 yaitu 6,21%. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,88 poin menjadi hanya 5,35%.

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan menjadi 5,50% namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi 5,47%. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Bangli mengalami pertumbuhan yang berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.



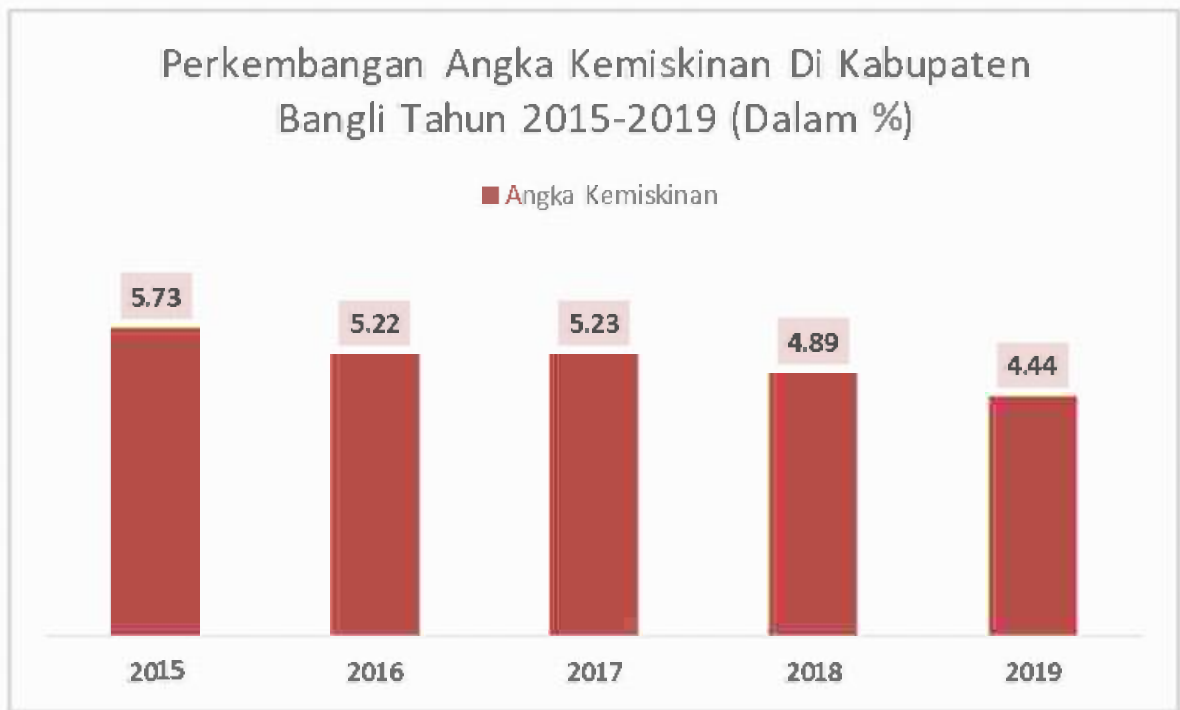
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

Gambar 5.16.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,73% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 4,44%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangli pada tahun 2019 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

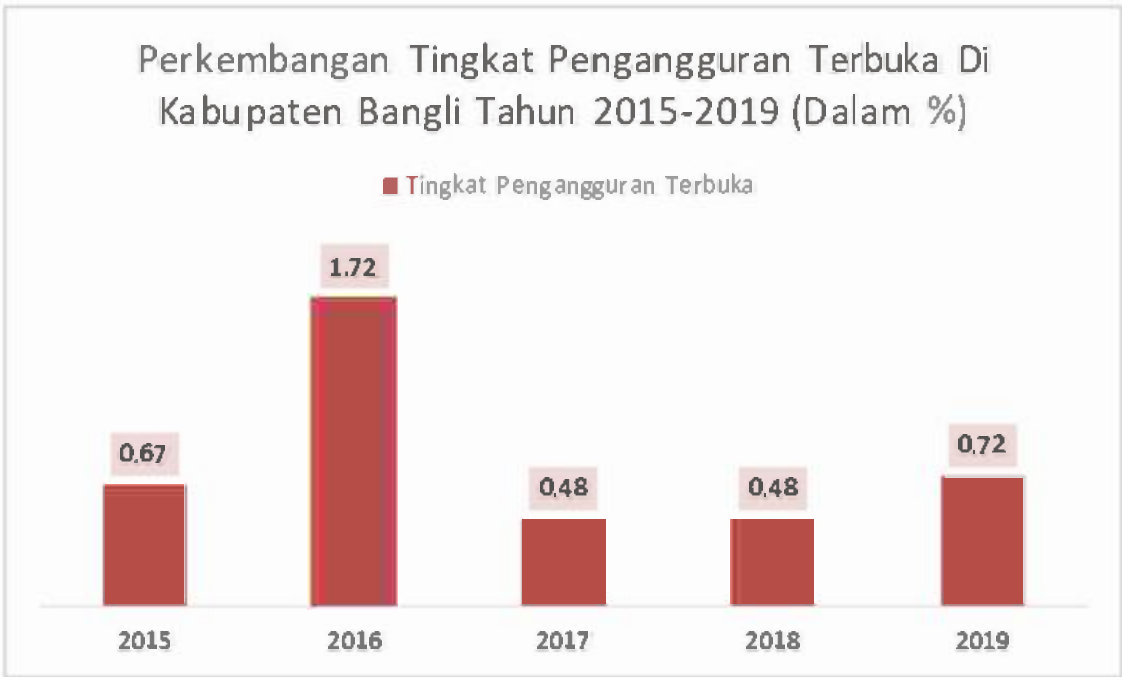
Gambar 5.17.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,67% dan meningkat tajam

di tahun berikutnya yaitu 1,72%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun drastis menjadi 0,72%. Angka ini berada jauh di bawah Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Bali yaitu 1,52%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

Gambar 5.18.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 66,24 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 69,35 di tahun 2019. IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2019 ini berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yaitu 71,92.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

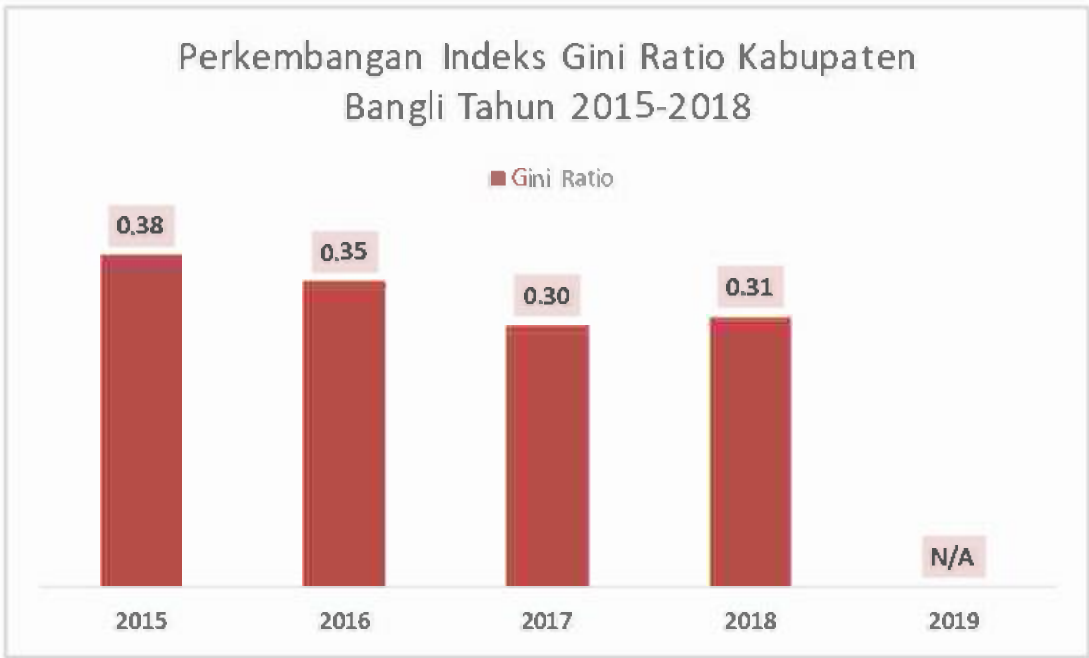
Gambar 5.19.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2018 adalah sebesar 0,31 atau naik dari tahun 2017 sebesar 0,30. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan dan pendapatan masyarakat cenderung merata. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Bangli cenderung merata, tidak terdapat kecamatan atau kawasan dengan tingkat perekonomian yang jauh diatas kecamatan/kawasan di sekitarnya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangli tercatat terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,38. Secara umum ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Bangli mengalami penurunan yang dapat dilihat dari penurunan Indeks Gini Rationya sebagaimana ditampilkan dalam grafik berikut.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

Gambar 5.20.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bangli tahun 2021 adalah Optimalisasi hasil pembayaran untuk masyarakat Kabupaten Bangli yang Gita Shanti.

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.	Pangan, Sandang dan Papan	Peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan
2.	Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat
5.	Pariwisata	Pembenahan Tata Kelola Objek Pariwisata
6.	Penguatan Infrastruktur	Pembenahan Tata Kelola Objek Pariwisata
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Peningkatan Pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial	Memantapkan pemenuhan kebutuhan PAUD/TK
		Memantapkan pemenuhan kebutuhan Dikdas dan Wajar 9 Tahun
		Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana prasarana olahraga
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan akses kesehatan melalui Poskesdes, Polindes dan Pustu
		Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk yang kurang mampu
		Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian berKB
		Meningkatkan kesadaran masyarakat akan PHBS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan penanganan terhadap fakir miskin dan PMKS
		Meningkatkan minat dan kualitas para calon transmigran
2	Pembenahan Tata Kelola Objek Pariwisata	Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata (DTW)
		Meningkatkan pelestarian panorama alam dan daerah tujuan wisata
		Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, tahura dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan
		Meningkatkan kualitas tataruang dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW)
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan, komunikasi dan informatika
3	Peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani	Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan
		Memetakan potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
		Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk sayuran
		Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi kelapa sebagai perkebunan unggulan
		Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi sapi bali, babi bali, itik bali dan ayam bali
		Memperkuat peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sawah, perlindungan sumber daya air, kesuburan tanah, dan akses produksi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Meningkatkan produksi buah lokal, seperti sawo, wani dan lain sebagainya.
		Mengaktifkan <i>sekee manyi</i>
		Memperkuat kelembagaan <i>Subak</i>
		Mempertegas peningkatan kedaulatan beras
		Mengembangkan kelestarian pertanian Tanaman Bumi Banten
4	Peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat	Penguatan keberadaan Desa Adat
		Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan
5	Peningkatan Pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten
		Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa
		Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dengan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum
		Meningkatkan kesadaran masyarakat Bangli untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
		Mengembangkan Inovasi dan meningkatkan daya saing daerah

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,30 - 6,70%
2	Angka Kemiskinan	3,80%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	-
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,23
5	Gini Ratio	0,40

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2020

E. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida).

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,28%. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung berada pada angka 6,11%. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,96 poin menjadi 5,32%. Artinya perekonomian Kabupaten Klungkung mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Klungkung (5,44%) mengalami

pertumbuhan yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.



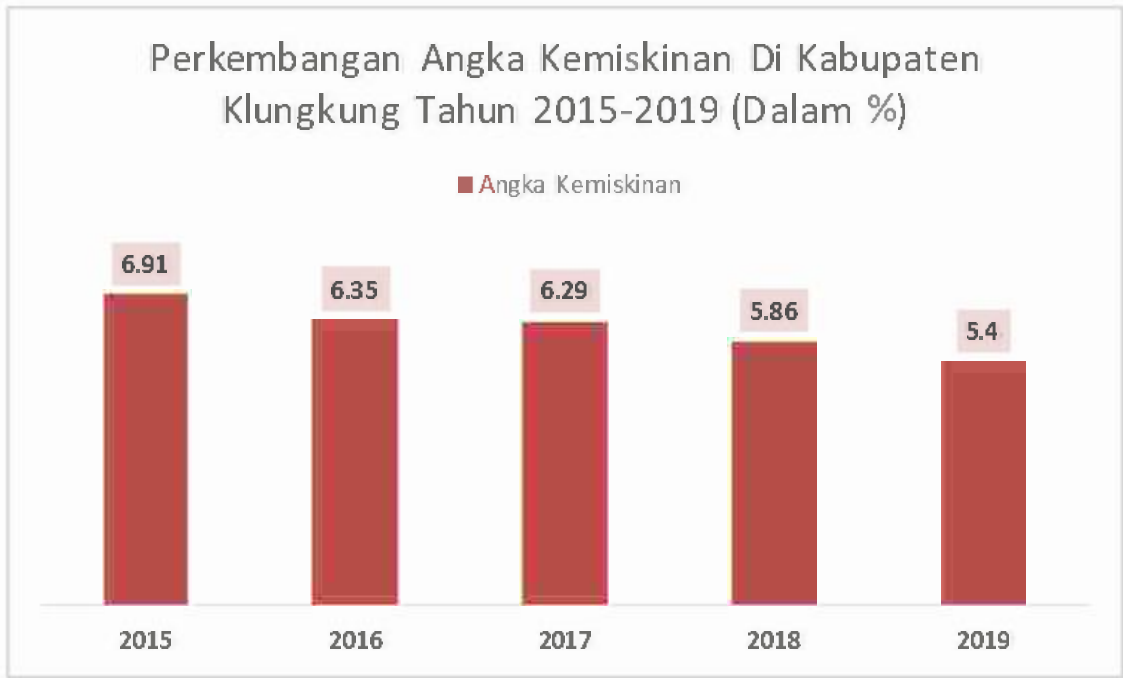
Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

Gambar 5.21.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,91% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 5,40%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

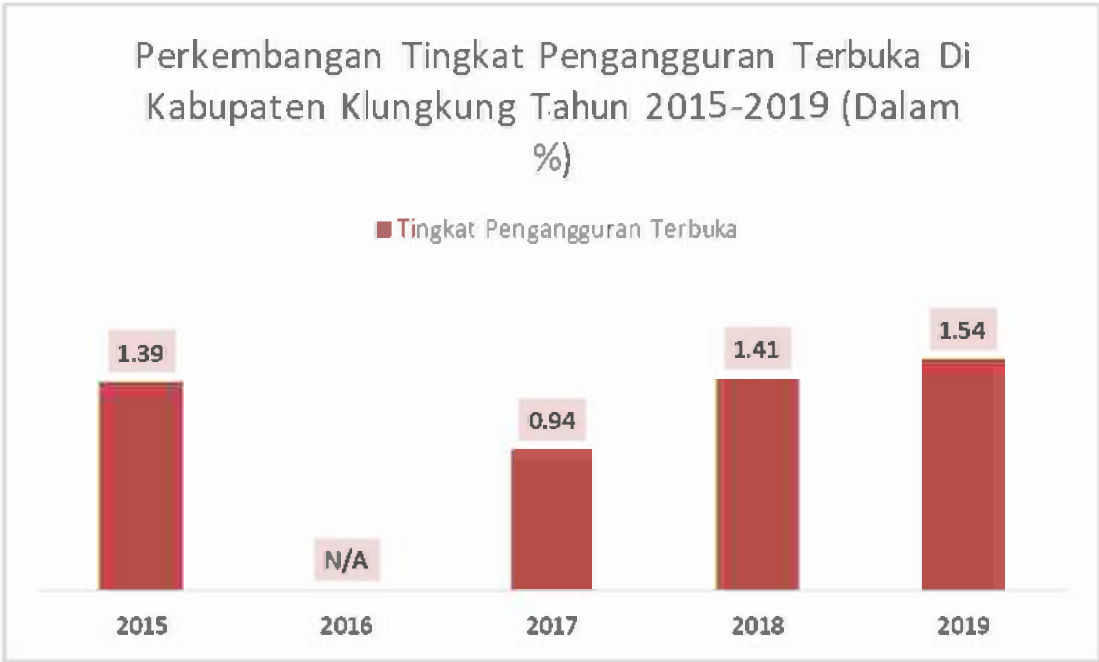
Gambar 5.22.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Terjadi peningkatan pada angka pengangguran terbuka meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,39% dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu ke angka 0,94% namun meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi 1,41%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung meningkat menjadi 1,54% dan angka ini berada di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%.



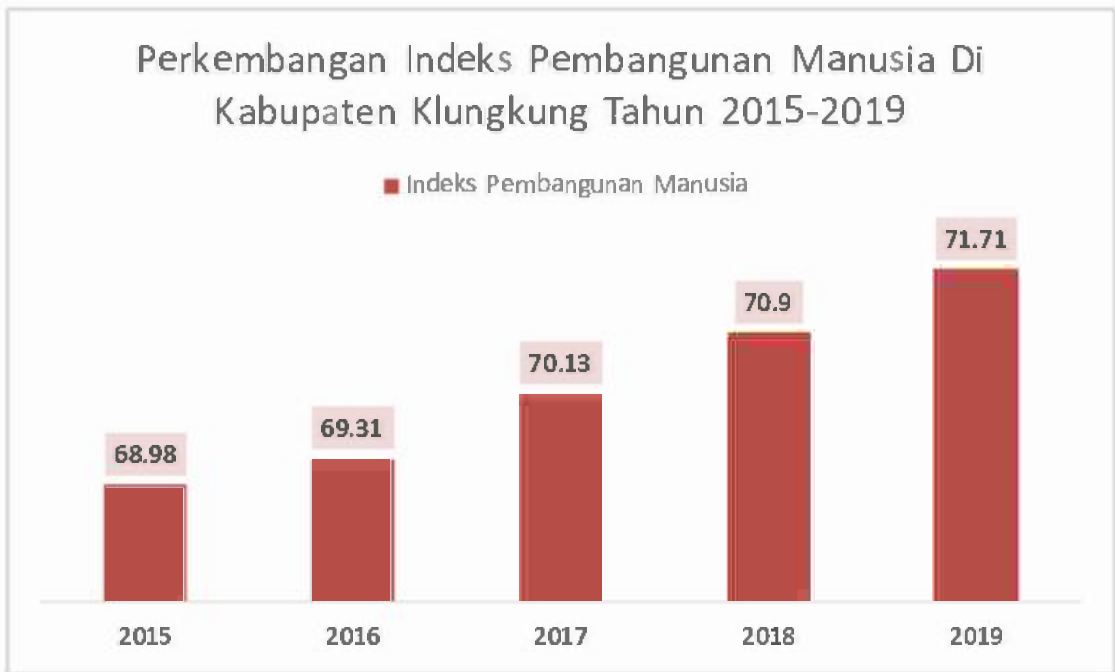
Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

Gambar 5.23.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 68,98 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 71,71 di tahun 2019. IPM Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yaitu 71,92.



Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

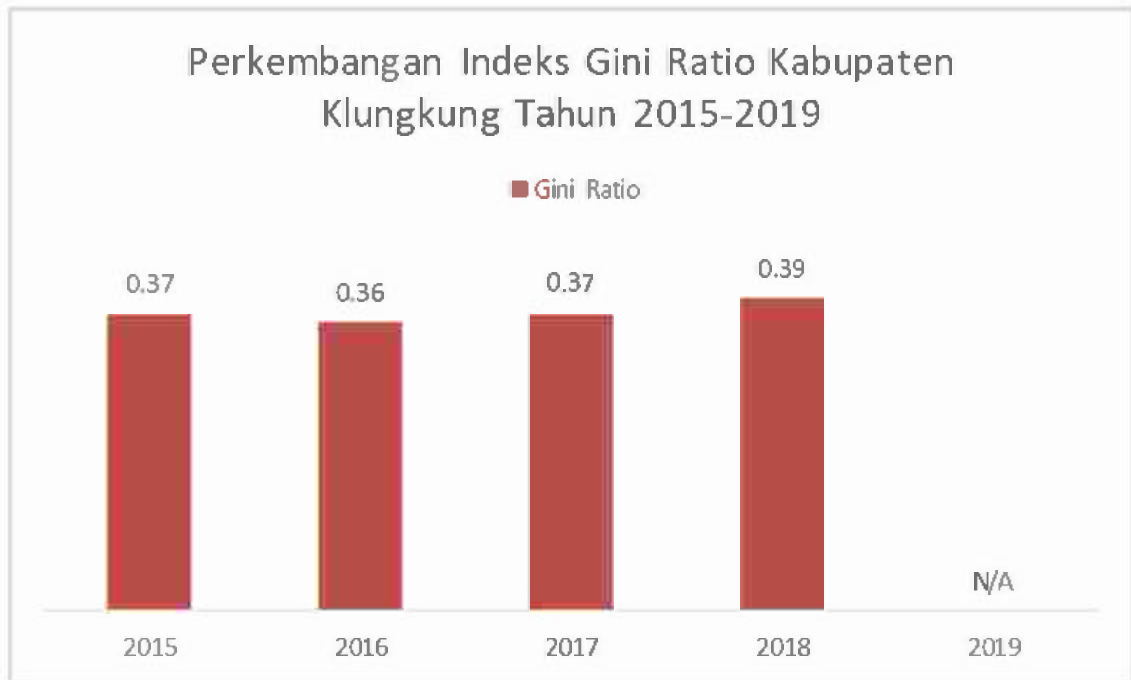
Gambar 5.24.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung cenderung stagnan pada angka 0,36-0,39 selama 5 tahun terakhir. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Klungkung tercatat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,39 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,36. Pada tahun 2016-2019 terdapat kecenderungan peningkatan pada indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung.

Peningkatan Gini Ratio ini, meskipun tidak signifikan, tetap mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Klungkung semakin lebar jaraknya mengingat pendapatan antar masyarakat cenderung mengalami perbedaan.



Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

Gambar 5.25.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung
Tahun 2015-2019

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian keempat kondisi tersebut di tahun 2019 dan 2020 antara lain sebagai berikut:

- a) Mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata di Nusa Penida.
- b) Merevitalisasi pasar rakyat
- c) Mengoptimalkan peran KUD untuk membeli gabah lokal lebih tinggi dari harga pasar dan menjual beras lebih murah dari harga pasar.
- d) Memberikan bedah rumah dan rehab rumah untuk KK miskin.
- e) Memberikan beasiswa kepada siswa KK miskin.
- f) Memberikan angkutan siswa gratis
- g) Memberikan *Universal Health Coverage* bagi seluruh masyarakat.
- h) Mengembangkan kembali budi daya rumput laut di Nusa Penida.

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG DILANDASI DENGAN PEMBANGUNAN SDM YANG HANDAL"

Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN KLUNGKUNG
1.	Pangan, Sandang dan Papan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2.	Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN KLUNGKUNG
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
5.	Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
6.	Penguatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2021, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

- a) Menjaga dan mengembangkan kelestarian kebudayaan daerah yang ditandai dengan meningkatnya cakupan budaya tak benda yang lestari mencapai 58,415 dan cakupan budaya benda yang lestari mencapai 58,82%.
- b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 71,37%.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah mencapai 8 tahun dan angka harapan sekolah mencapai 13,8 tahun.
- d) Meningkatkan daya saing masyarakat yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 0,98%.
- e) Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar yang ditandai dengan meningkatnya cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar mencapai 67,8%.

- f) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya baku mutu air mencapai 61,2.
- g) Meningkatkan kemandirian PMKS yang ditandai dengan meningkatnya cakupan PMKS mandiri mencapai 53%.
- h) Meningkatkan kesetaraan gender yang ditandai dengan menurunnya pengangguran perempuan menjadi 202 orang dan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah perempuan mencapai 7,72 tahun.
- i) Mewujudkan masyarakat desa yang mandiri yang ditandai dengan meningkatnya persentase desa yang berstatus swasembada mencapai 32%.
- j) Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang yang ditandai dengan persentase tercapainya TFR (2,1), NRR (1). LPP (1,1) mencapai 98%.
- k) Meningkatkan investasi daerah yang ditandai dengan meningkatnya PMA menjadi US\$754.161, meningkatnya PMDN menjadi 1.402 milyar.
- l) Meningkatkan peran usaha ekonomi rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB menjadi 8,13%, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 10%, kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 17% dan nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB sebesar 1.259.158 juta rupiah.
- m) Meningkatkan keragaman pola konsumsi pangan yang ditandai dengan meningkatnya skor pola pangan harapan menjadi 88,21
- n) Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah yang ditandai dengan meningkatnya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten menjadi 71.
- o) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik menjadi 3,38.

- p) Meningkatkan kesadaran demokrasi yang ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pileg, pilpres, pilkada dan pilkel menjadi 76,7%.
- q) Menurunkan potensi konflik yang ditandai dengan menurunnya potensi konflik sosial menjadi 15.
- r) Menurunkan tingkat risiko bencana yang ditandai dengan menurunnya indeks risiko bencana menjadi 163%.
- s) Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran perda menjadi 330 pelanggaran.

Guna mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2021 tersebut, maka akan dilakukan beberapa strategi antara lain:

- a) Menjaga dan mengembangkan kelestarian kebudayaan daerah.
- b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- d) Meningkatkan daya saing masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar.
- f) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- g) Meningkatkan kemandirian PMKS.
- h) Meningkatkan kesetaraan gender.
- i) Mewujudkan masyarakat desa yang mandiri.
- j) Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang
- k) Meningkatkan investasi daerah.
- l) Meningkatkan peran usaha ekonomi rakyat.
- m) Meningkatkan keragaman pola konsumsi pangan.
- n) Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah.
- o) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- p) Meningkatkan kesadaran demokrasi
- q) Menurunkan potensi konflik.
- r) Menurunkan tingkat risiko bencana
- s) Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00%
2	Angka Kemiskinan	3,84%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,98%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,13
5	Gini Ratio	0,37

Sumber: Bappelitbang Kab Klungkung Tahun 2020

F. Kabupaten Tabanan

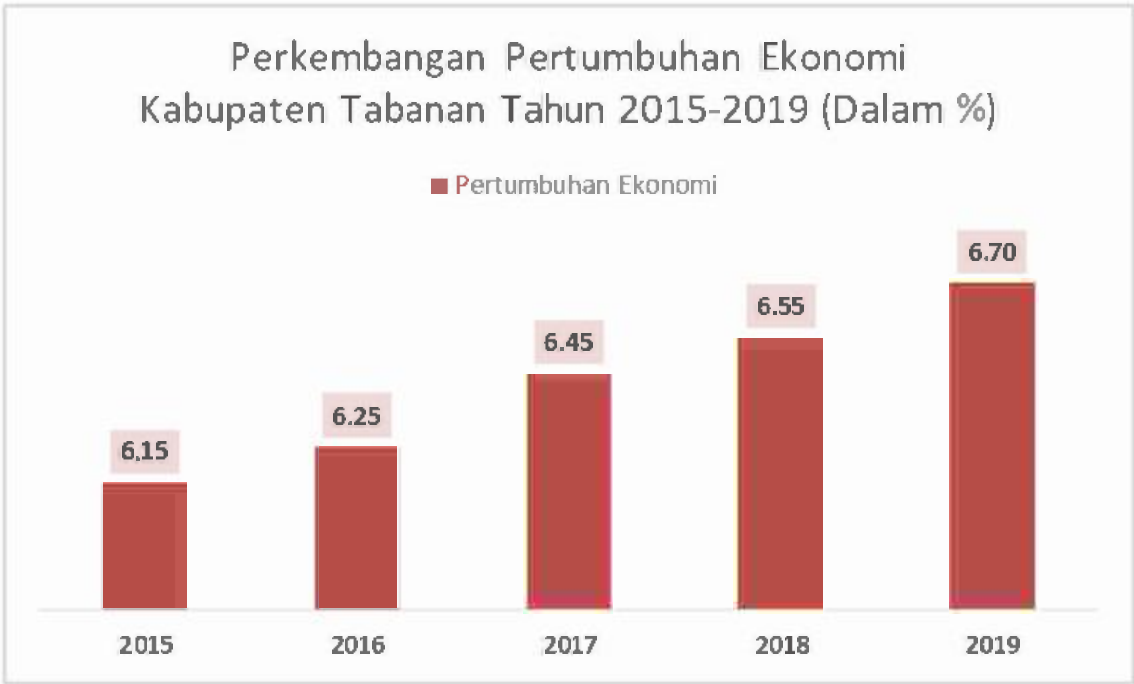
Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend positif pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana tercatat mencapai angka 6,70%. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan berada pada angka 6,15%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan yang berada jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.



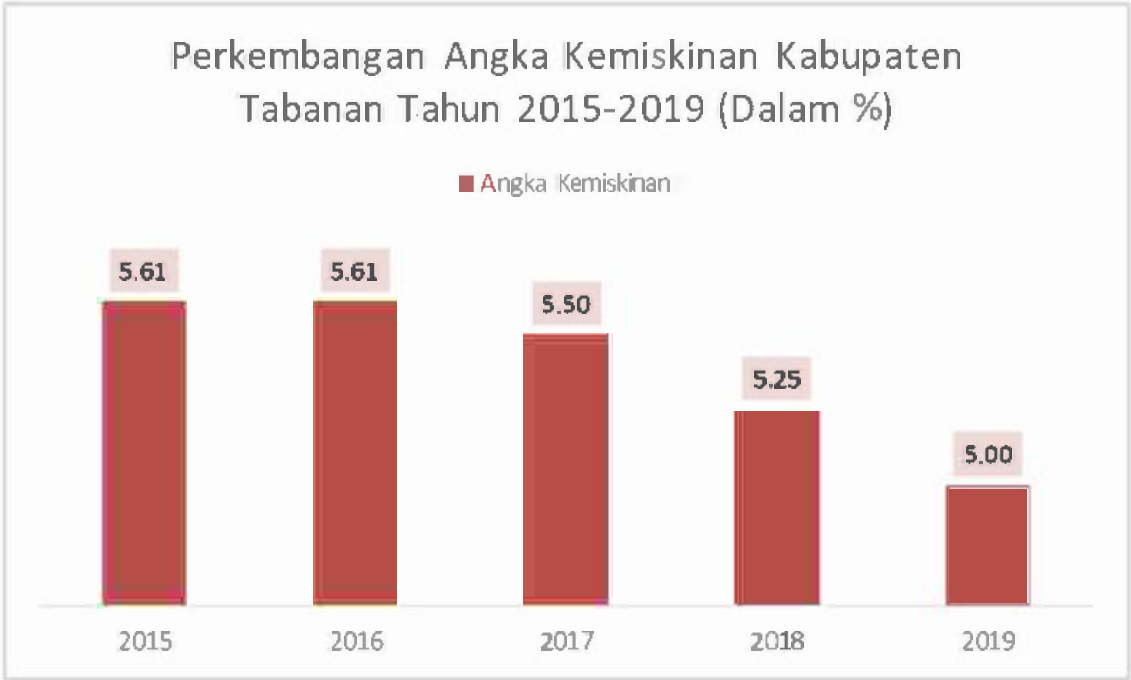
Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Gambar 5.26.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,61% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 5,00%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Gambar 5.27.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 2,25% dan terus mengalami penurunan di tahun berikutnya. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun drastis menjadi 1,90% namun, angka ini berada di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Gambar 5.28.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 73,54 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 77,01 di tahun 2019. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun IPM Nasional yaitu 71,92.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

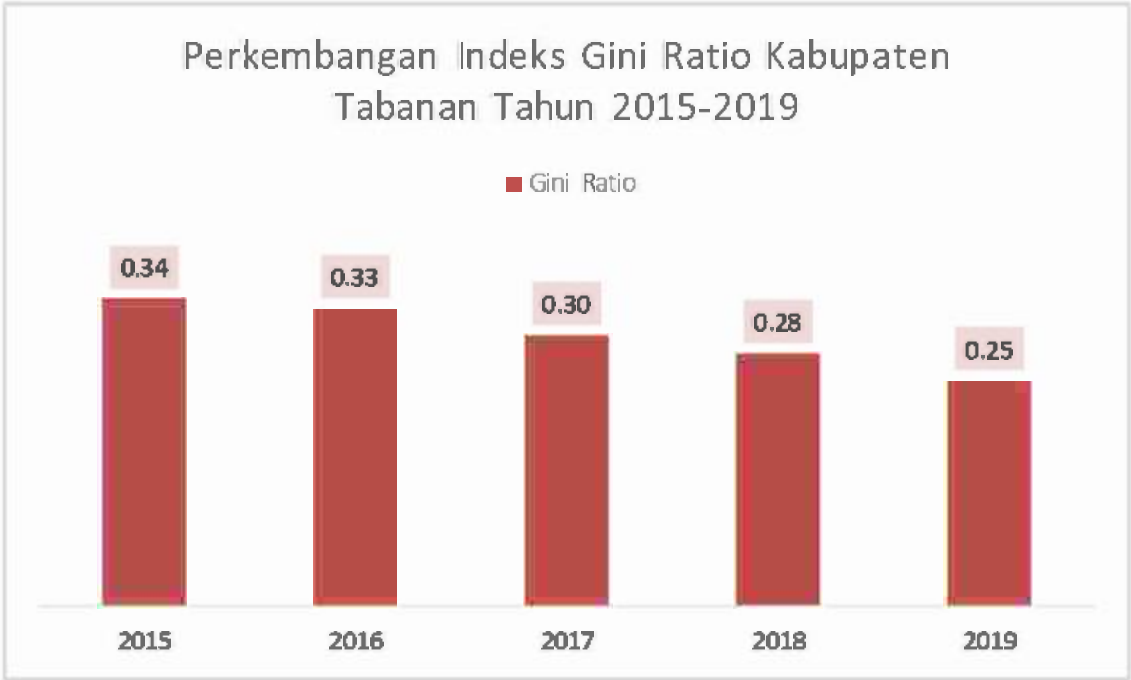
Gambar 5.29.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 adalah sebesar 0,25 atau turun dari tahun 2018 sebesar 0,28. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Tabanan semakin kecil jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung lebih merata. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Tabanan cenderung merata, tidak terdapat kecamatan atau kawasan dengan tingkat perekonomian yang jauh diatas kecamatan/kawasan di sekitarnya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Tabanan tercatat terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,34. Angka Gini Ratio di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,37.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Gambar 5.30.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"GENERASI MILENIAL UNTUK INDUSTRI PARIWISATA BERKELANJUTAN"

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN TABANAN
1	Pangan, Sandang dan Papan	Pendidikan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pertanian
5	Pariwisata	Budaya dan Industri Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	Lingkungan Hidup
7	Pelayanan Publik	Infrastruktur

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a) Pendidikan

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu Pendidikan.

b) Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

c) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya perlindungan sosial masyarakat, menciptakan rasa aman masyarakat, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, menurunnya angka kriminalitas serta peningkatan kualitas generasi milenial.

d) Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatnya kemampuan petani, nelayan dan peternak dalam mengelola sumber daya

alam secara lestari dan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani.

e) Budaya dan Industri Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah, meningkatnya kunjungan wisata ke obyek wisata, daya tarik wisata, dan desa wisata.

f) Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

g) Infrastruktur

Sebagai pendukung 6 (enam) bidang prioritas, memiliki target mewujudkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pencapaian enam bidang prioritas. Target ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung pemerintah yang layak pakai, sarana/prasarana transportasi yang memadai, kondisi perumahan/permukiman yang sehat, dan mewujudkan optimalisasi jaringan irigasi/sumber daya air.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2021

No	Indikator	Target Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,00%
2	Angka Kemiskinan	4,50%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75%
4	Indeks Pembangunan Manusia	79,01
5	Gini Ratio	0,10

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2020

G. Kabupaten Buleleng

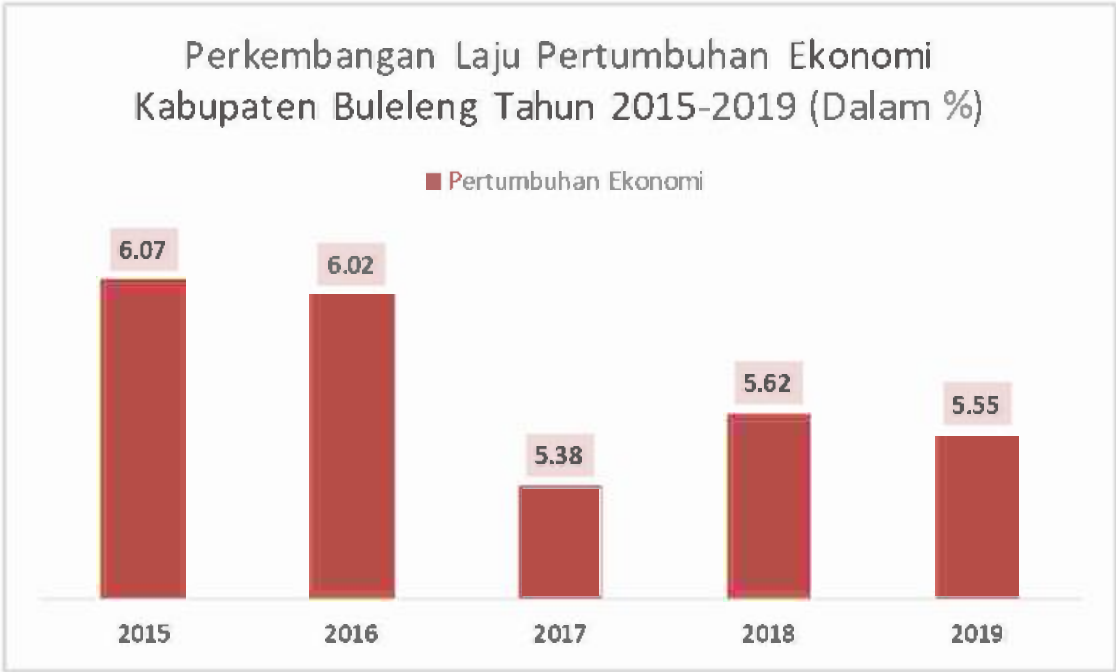
Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Bui, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dimana tercatat mencapai angka 6,07%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,38%, Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,62%, namun kembali menurun menjadi 5,55% di tahun 2019. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Artinya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



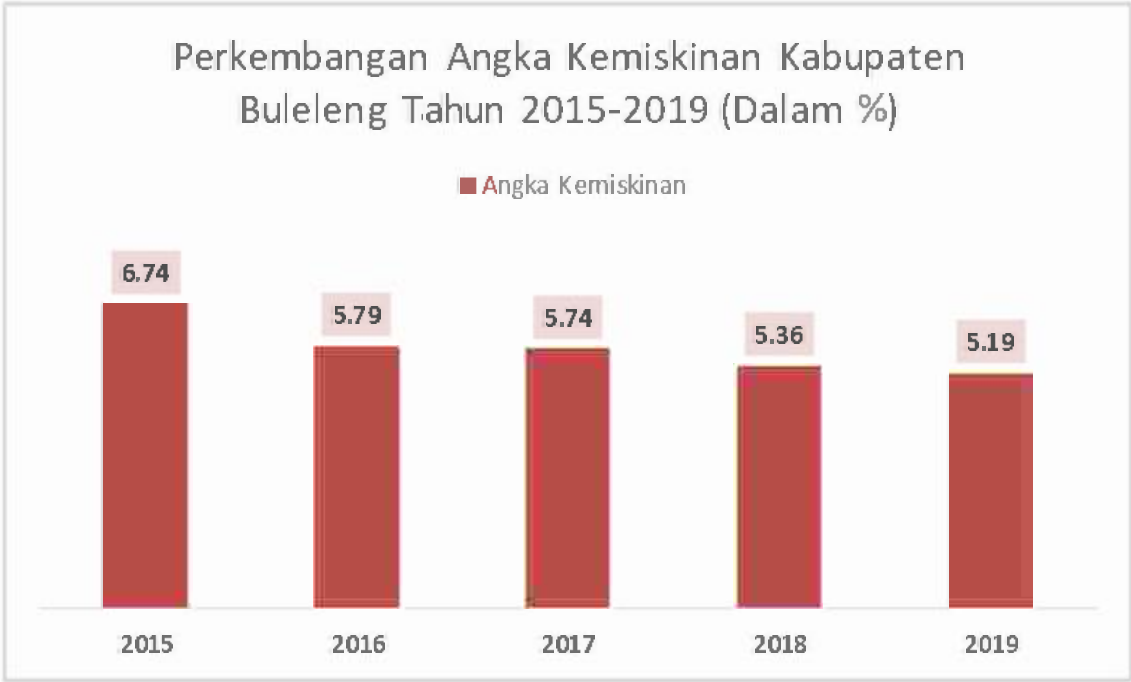
Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Gambar 5.31.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,74% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 5,19%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Gambar 5.32.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 2,04% dan kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 2,41%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng meningkat cukup signifikan menjadi 3,02%. Angka ini berada di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



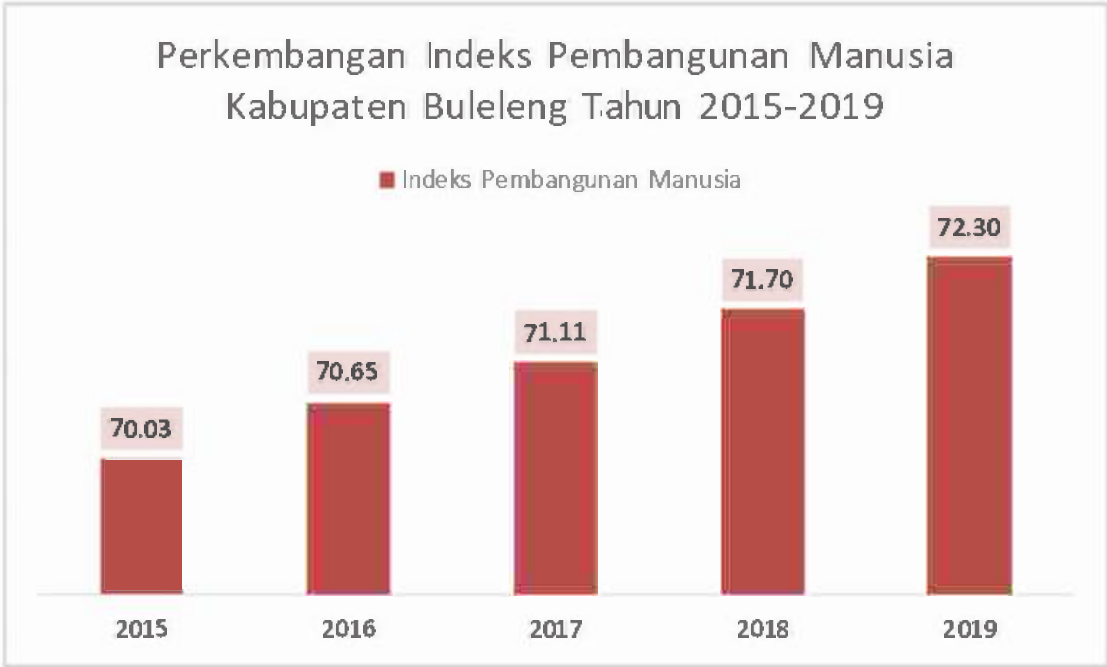
Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Gambar 5.33.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 70,03 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,30 di tahun 2019. IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 71,92. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

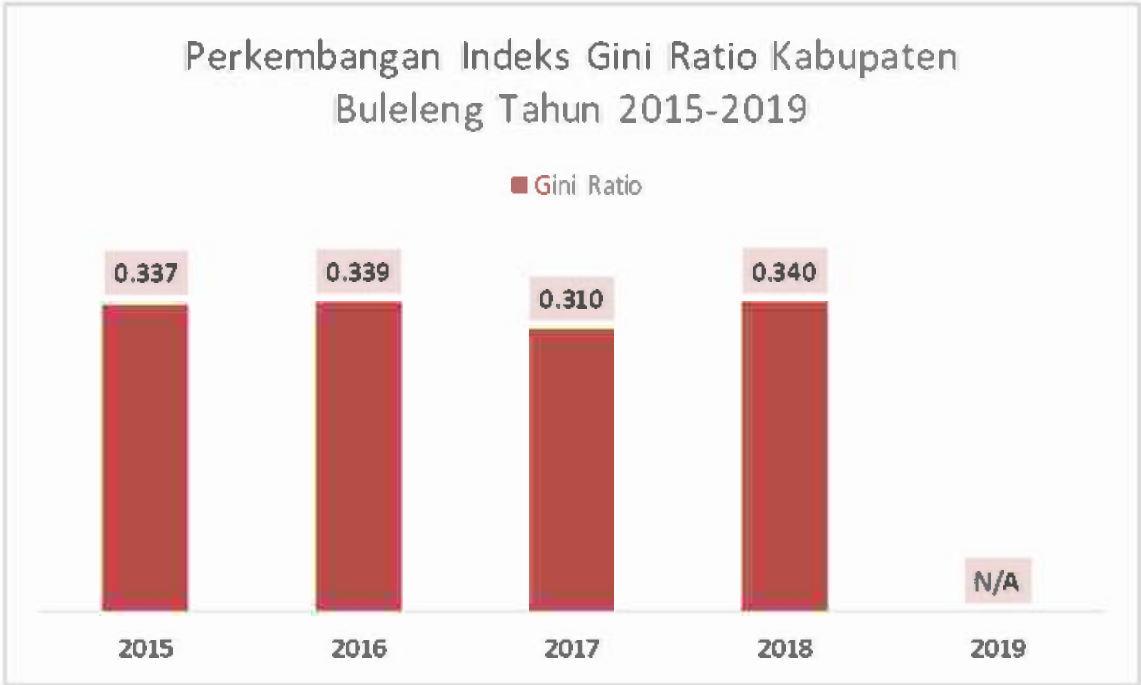
Gambar 5.34.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 adalah sebesar 0,34 atau naik dari tahun 2017 dengan indeks 0,31. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Buleleng mengalami pelebaran jarak meskipun tergolong kecil. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Buleleng cenderung tidak merata, dimana terdapat kecamatan atau kawasan dengan tingkat perekonomian di atas kecamatan/kawasan di sekitarnya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Buleleng tercatat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,34. Angka Gini Ratio di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,37.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Gambar 5.35.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN TERINTEGRASI PARIWISATA DENGAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF"

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN BULELENG
1	Pangan, Sandang dan Papan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya saing
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penguatan Adat dan Budaya Daerah
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pengembangan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan
5	Pariwisata	Pelayanan Dasar dan Penguatan Infrastruktur
6	Penguatan Infrastruktur	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Jaminan Sosial
7	Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
 - 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 3) Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 4) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 5) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b) Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya saing
 - 1) Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 4) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- c) Penguatan Adat dan Budaya Daerah
 - 1) Pengembangan Kebudayaan

- 2) Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- d) Pengembangan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan
 - 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 2) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 3) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 4) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kelautan Dan Kemandirian Pangan
 - 5) Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 6) Pengelolaan Persampahan
- e) Pelayanan Dasar dan Penguatan Infrastruktur
 - 1) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - 3) Penyelenggaraan Jalan
 - 4) Pengembangan Perumahan
 - 5) Penanggulangan Bencana
- f) Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Jaminan Sosial
 - 1) Pemberdayaan Sosial
 - 2) Rehabilitasi Sosial
 - 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 4) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 5) Pengelolaan Perikanan Budidaya
- g) Pemantapan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
 - 3) Penyelenggaraan Keuangan Daerah
 - 4) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 5) Informasi dan Komunikasi Publik
 - 6) Aplikasi dan Informatika

Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,85%
2	Persentase Kemiskinan	5,10%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,74%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,10
5	Gini Ratio	0,3057

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2020

H. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan.

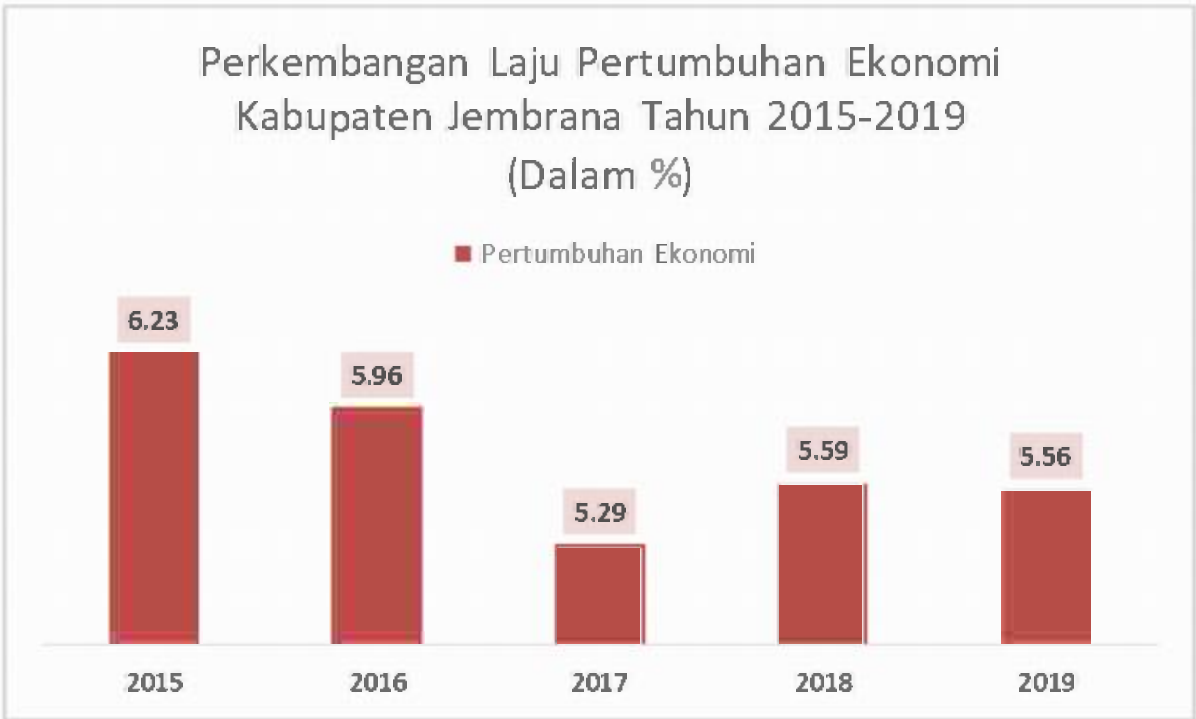
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dimana tercatat mencapai angka 6,23%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,29%, Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,59%, namun kembali menurun menjadi 5,56% di tahun 2019. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Artinya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana termasuk

rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



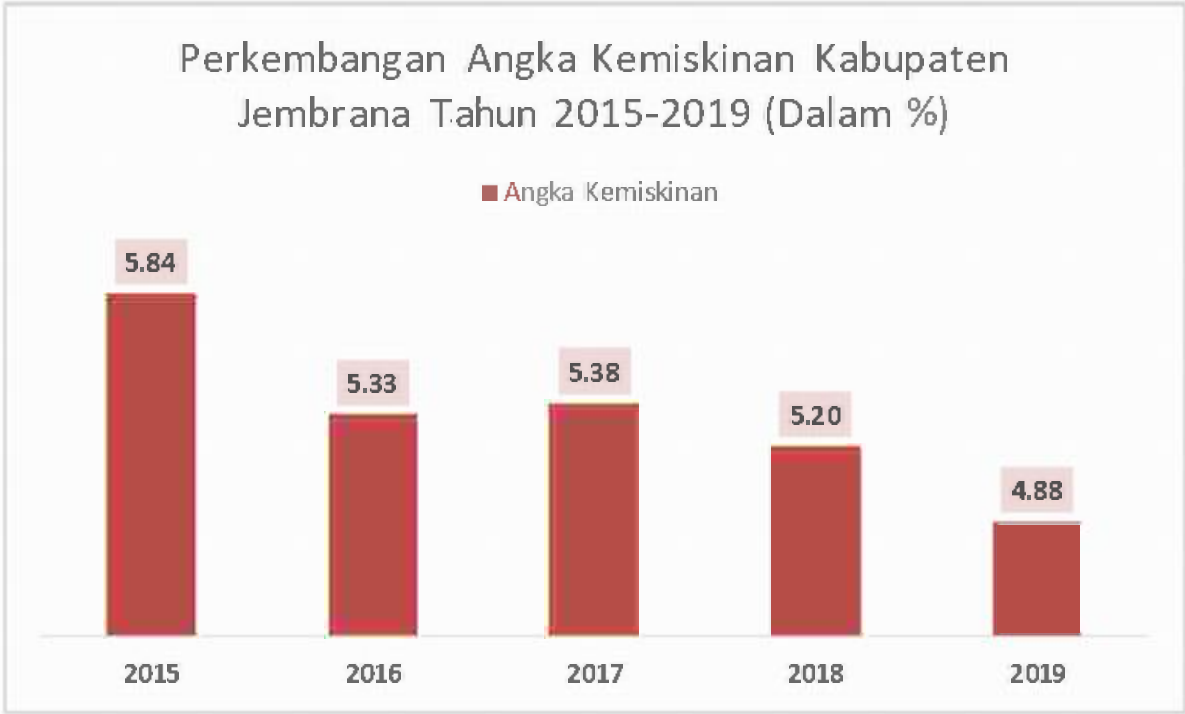
Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Gambar 5.36.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,84% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 4,88%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



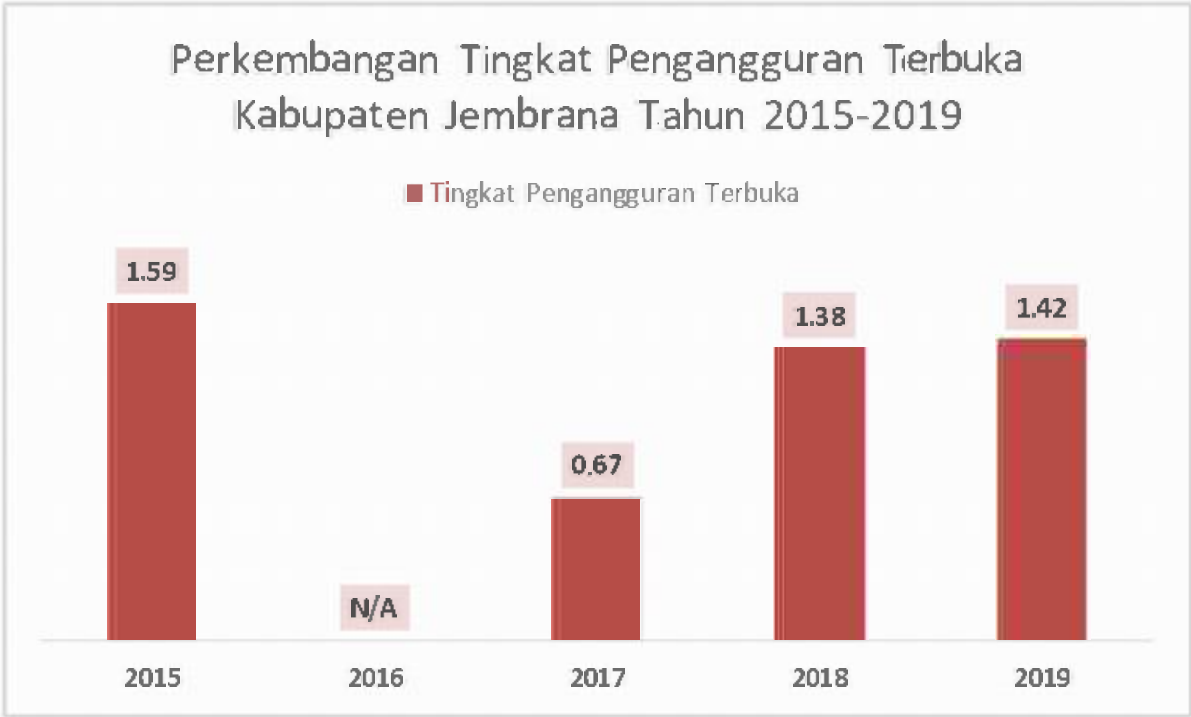
Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Gambar 5.37.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,59% dimana kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2017 menjadi 0,67%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana meningkat cukup signifikan menjadi 1,42%. Angka ini berada sedikit di bawah Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana tergolong rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



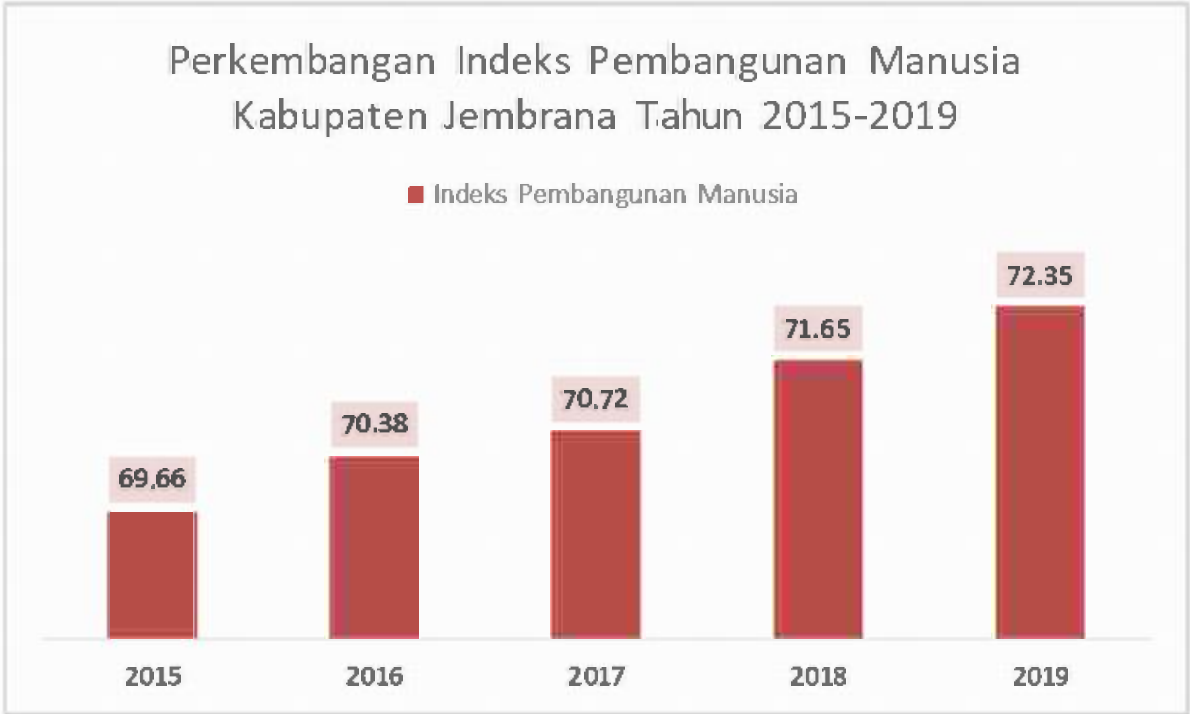
Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Gambar 5.38.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 69,66 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,35 di tahun 2019. IPM Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 71,92. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

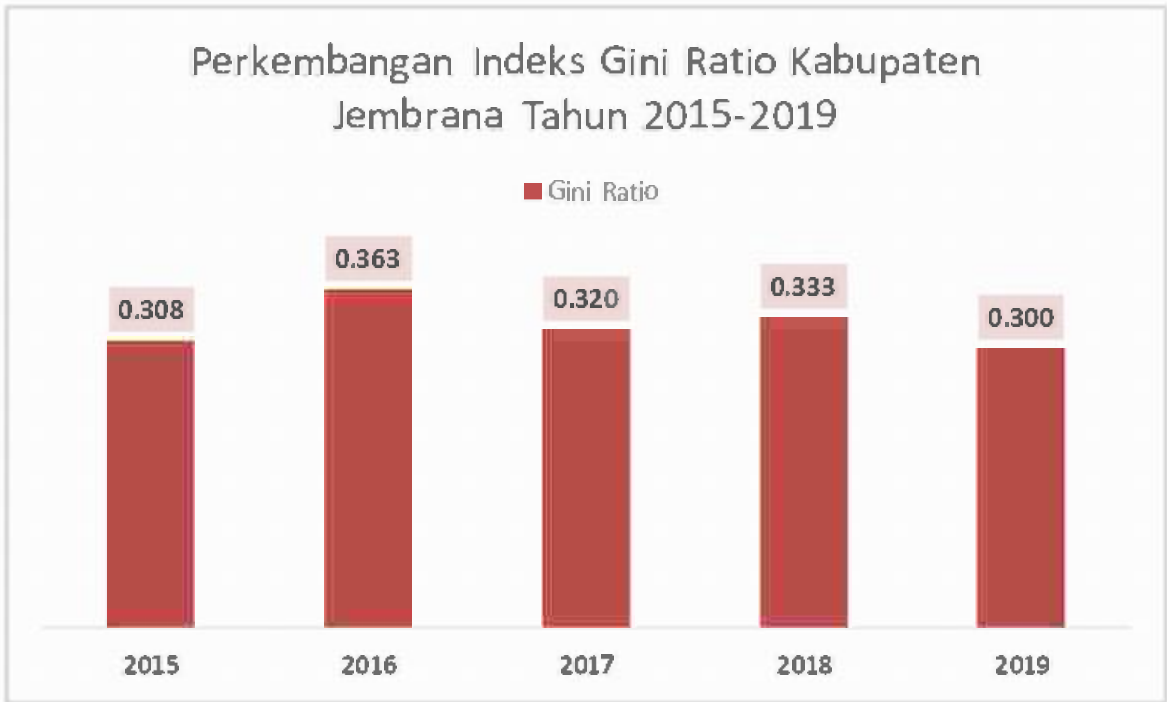
Gambar 5.39.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 adalah sebesar 0,30 atau turun dari tahun 2018 dengan indeks 0,33. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Jembrana mengalami penyempitan jarak meskipun tergolong kecil. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Jembrana cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Jembrana tercatat terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,36. Angka Gini Ratio di Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,37.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Gambar 5.40.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana
Tahun 2015-2019

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"MELALUI PENYEDERHANAAN REGULASI DAN BIROKRASI GUNA TERWUJUDNYA SINERGI KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA"

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN JEMBRANA
1	Pangan, Sandang dan Papan	Pangan, Sandang dan Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Bidang Adat, Agama, dan Kebudayaan
5	Pariwisata	Bidang Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Pangan, Sandang dan Papan• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7	Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat difokuskan pada:
- 1) Pembangunan pendidikan, yaitu pada Pendidikan Dasar, rehabilitasi sarana prasarana sekolah, dan prestasi pendidikan.
 - 2) Pembangunan kesehatan difokuskan pada kemandirian masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
 - 3) Pengentasan kemiskinan perumahan yang layak huni difokuskan pada pengentasan layanan perumahan yang layak huni.
 - 4) Penurunan pengangguran difokuskan pada masuknya investasi padat karya dan bukan padat modal diimbangi dengan penyiapan tenaga kerja utamanya tenaga kerja terampil.

- 5) dan Ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pendapatan petani
- b) Aspek Pelayanan Publik difokuskan pada:
 - 1) Pelaksanaan Mal pelayanan publik untuk menciptakan layanan cepat, tepat dan akuntabel.
 - 2) Penuntasan layanan persampahan dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama limbah plastic.
- c) Aspek Daya Saing difokuskan pada:
 - 1) Peningkatan hasil produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, memasok kebutuhan Bali dan pangsa pasar ekspor.
 - 2) Pengembangan Sektor Industri melalui Penyiapan Infrastruktur dan kemudahan Investasi.
 - 3) Pengembangan Sektor Pariwisata Unggulan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.24.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,05-6,15%
2	Persentase Kemiskinan	3,95%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,09%
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,94-72,94
5	Gini Ratio	0,27

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Jembrana Tahun 2020

I. Kota Denpasar

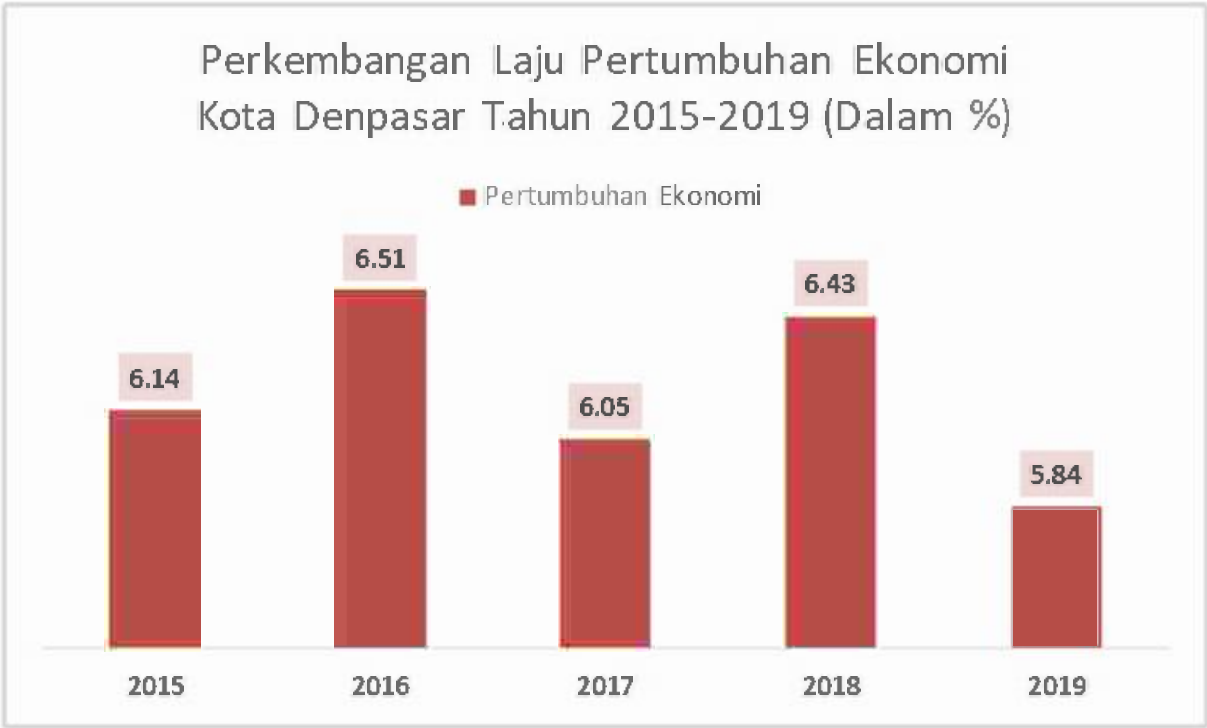
Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,51%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,84%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Artinya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar termasuk tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

Gambar 5.41.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kota Denpasar mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 2,39% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 2,10%. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2019 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 3,61% dan Nasional dengan angka kemiskinan 9,22%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

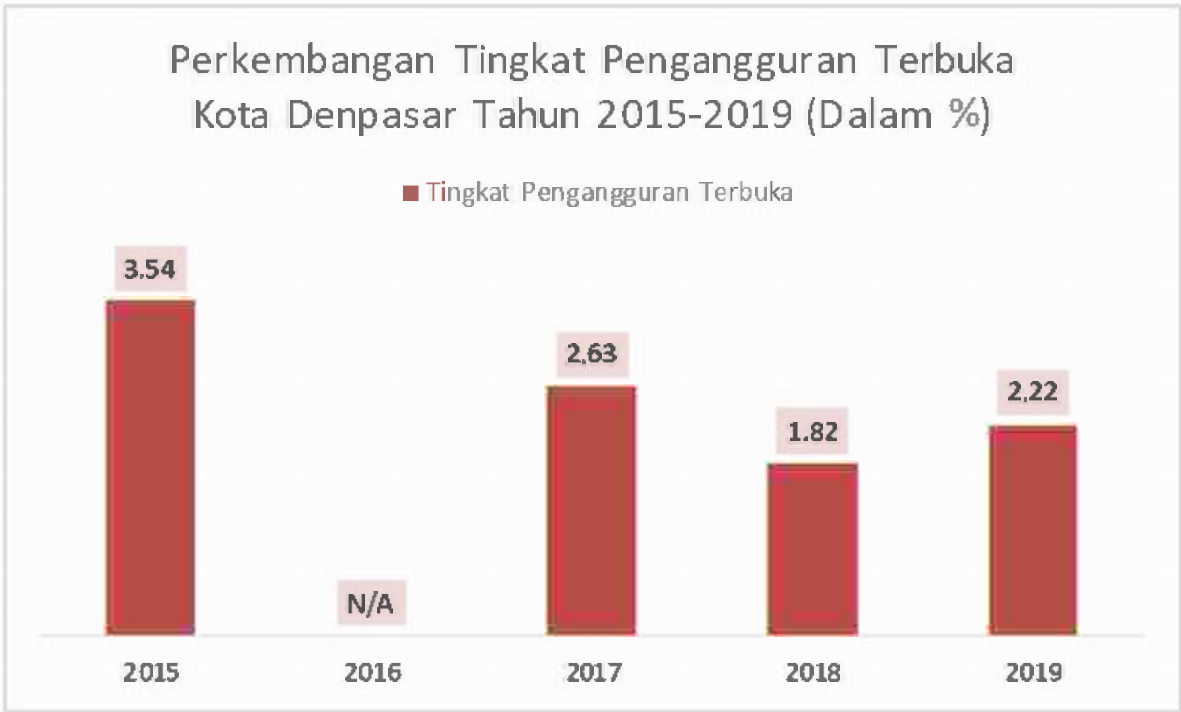
Gambar 5.42.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 3,54% dimana kemudian

mengalami penurunan signifikan di tahun 2017 menjadi 2,63%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar berada pada angka 2,22%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kota Denpasar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

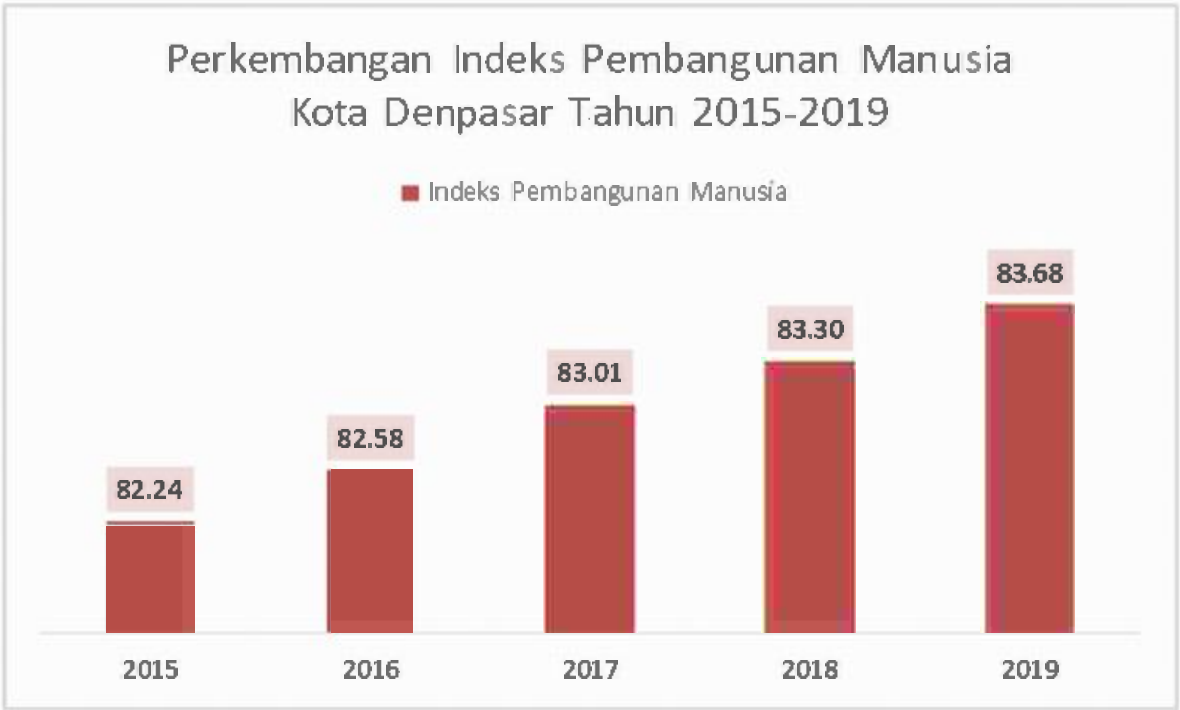
Gambar 5.43.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kota Denpasar sebesar 82,24 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 83,68 di tahun 2019 dan menjadi yang tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali. IPM Kota Denpasar pada tahun 2019 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,38 maupun Nasional yaitu 71,92. Artinya, secara rata-rata,

kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

Gambar 5.44.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada tahun 2018 adalah sebesar 0,34 atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2017. Tetapnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kota Denpasar tidak mengalami pergeseran, tidak melebar maupun menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kota Denpasar tercatat terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,36.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

Gambar 5.45.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselaranan tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25.

Keselaranan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"MEMPERKUAT EKONOMI KREATIF BERBASIS BUDAYA DIDUKUNG SDM YANG BERKUALITAS "

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

Keselaranan prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KOTA DENPASAR
1	Pangan, Sandang dan Papan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ekonomi Kreatif • Pembangunan SDM yang Berkualitas
2	Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan SDM yang Berkualitas
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pariwisata Berbasis Budaya
5	Pariwisata	
6	Penguatan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur
7	Pelayanan Publik	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.

- Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
- Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (*selfsuffiency*) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
- Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
- Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
- Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.
- Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

- i) Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
- j) Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
- k) Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27.

Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,89%
2	Persentase Kemiskinan	2,00%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00%
4	Indeks Pembangunan Manusia	84,24
5	Gini Ratio	0,23

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020